

# MEDIA KALTIMTARA

RABU,  
25 OKTOBER  
2023

.COM

PASANG IKLAN  
HUBUNGI:  
0853 8684 3137

TERDEPAN DALAM BERITA

## TARGET KLA BULUNGAN 2024 NAIK JADI MADYA

BACA HALAMAN 2



## KEPALA LAPAS KELAS IIA TARAKAN RESMI BERGANTI

BACA HALAMAN 10

# Target KLA Bulungan 2024 Naik jadi Madya

**TANJUNGSEROR** - Pemerintah kabupaten Bulungan, gelar rapat evaluasi mengenai Kabupaten Layak Anak (KLA). Dengan melibatkan unsur terkait termasuk pihak perusahaan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bapeda Litbang) Bulungan, Iwan Sugianta saat dikonfirmasi menjelaskan, rapat ini tindak lanjut dari evaluasi yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pusat beberapa waktu lalu.

“Harapannya melalui rapat ini, dapat menaikkan skor KLA Bulungan, tidak hanya sebagai pratama tapi bisa naik menjadi madya,” ungkap Iwan Sugianta, saat dikonfirmasi oleh wartawan, Selasa (24/10/2023).

Pertemuan yang melibatkan beberapa unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, kata Iwan untuk memastikan kesiapan dan dokumen yang mendasari. Termasuk dari sisi penganggaran, yang mesti harus dipersiapkan.

“Soal penganggaran juga kita sampaikan untuk tahun 2024. Melalui rapat tersebut, semua bisa bergerak dan dokumen yang kurang akan dilengkapi,” tukasnya.

Sehingga dengan begitu, ketika ada penilaian pada tahun 2024, status KLA Bulungan bisa naik dari Pratama ke madya. Meskipun begitu, kata dia ada beberapa kelengkapan yang mesti dipenuhi terlebih dahulu oleh pemerintah daerah.

Dalam proses pelaksanaan, pemerintah tetap berlandaskan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2019. Termasuk didalamnya akan disusun Rencana Aksi Daerah (RAD), dengan kedepannya akan terus berupaya melakukan revisi pada



aturan yang baru. Ada beberapa program yang belum terakomodir dalam Perda. Kemudian yang utama lagi soal peran publikasi agar KLA Bulungan bisa benar-benar memiliki gaung.

“Sehingga orang luar mengetahui, bahwa Pemkab Bulungan berupaya untuk menciptakan KLA dengan melibatkan lintas sektor,” tuturnya.

Sementara itu, ketua DPRD Bulungan Kilat saat dikonfirmasi menambahkan pihaknya mendorong peran serta lintas sektor dalam mendukung program pemerintah. KLA kata dia, harus dimaknai secara luas, artinya dari sisi pelayanan harus disediakan ruang tersendiri bagi anak-anak untuk berekspresi, termasuk fasilitas publik mesti disediakan taman bermain bagi anak.

“Termasuk beberapa hal penting untuk mendorong, Kabupaten Layak

Anak. Kita berharap, ini bisa terealisasi dan diimplementasikan sehingga ada nilai lebih terhadap pelayanan pemerintah oleh masyarakat,” tuturnya.

Disamping itu, penerapan fasilitas yang ramah terhadap anak, mesti diterapkan juga bagi fasilitas publik termasuk pihak perusahaan. Misalnya, dengan memastikan anak di bawa umur tidak diperkenankan untuk bekerja di perusahaan layaknya orang dewasa, jikalau pun itu ada harus ada perlakuan khusus dengan tetap memperhatikan tumbuh kembang anak.

“Kita apresiasi adanya KLA ini, dewasa berharap program ini ditingkatkan sampai anak-anak di Bulungan merasakan mandi langsung, dari program tersebut,” tandasnya. (tin/and)

*Editor: Andhika*



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah saat mendampingi Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

## Syarifatul Apresiasi Perhatian Hetifah untuk Pendidikan Berau

TANJUNG REDEB – Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah dan Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Sri Kumalasari mendampingi Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian berkunjung sekaligus secara simbolis memberikan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) kepada para penerima dari berbagai tingkatan sekolah, di SMAN 2 Berau.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian telah menyiapkan sebanyak 15.000 kuota beasiswa PIP bagi para pelajar yang ada di Kabupaten Berau. Yang terbagi menjadi gelombang pertama 10.000 kuota dan kedua sebanyak 5.000 kuota.

Beasiswa tersebut ditargetkan untuk mendorong minat belajar dan membantu kelancaran pendidikan bagi pelajar yang menerimanya. Apalagi Berau masuk dalam KSPN sehingga perlu memiliki SDM yang unggul di bidang akademik.

“Tadi saya sudah mendengar usulan dan masukan terkait beasiswa

PIP, tentunya menjadi catatan khusus untuk menjadi bahan evaluasi ke depannya,” terang Hetifah.

Meski saat ini pendidikan sudah gratis, namun diakuinya kebutuhan pendukung pembelajaran tetap perlu dipenuhi secara pribadi. Sehingga melalui beasiswa tersebut diharapkan dapat membantu penerima yang membutuhkan. “Saat ini kami juga tengah berupaya mempercepat pencairan beasiswa PIP untuk Berau. Kita juga akan dorong perbankan untuk jemput bola ke pelajar yang jauh dari akses menuju perbankan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah mengatakan, dirinya mewakili DPRD Berau berterima kasih kepada Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian yang berkenan turun langsung ke Daerah Pemilihan (Dapil), khususnya di Kabupaten Berau.

“Ini merupakan bentuk perhatian yang diberikan kepada kita, khususnya pemberian beasiswa bagi pelajar

di Kabupaten Berau,” ungkapnya.

Ia pribadi juga mengapresiasi perhatian yang diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan melalui beasiswa PIP tersebut. Masyarakat yang menginginkan anaknya mendapatkan beasiswa bisa mengusulkan melalui perwakilan rakyat, yakni Hetifah.

“Kami dari DPRD Berau mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hetifah yang memberikan aspirasinya berupa beasiswa untuk siswa-siswi di Bumi Batiwakkal,” ucapnya.

Syarifatul berharap, anak-anak di Kabupaten Berau tidak ada lagi yang tidak bersekolah atau sampai putus sekolah. Pasalnya, pemerintah tidak memungut biaya apapun untuk sekolah. Yang ada malah memberikan beasiswa berupa PIP ini.

“Semoga para pelajar di Berau kelak menjadi generasi yang membanggakan orangtua dan membawa nama baik sekolah hingga sukses di masa yang akan datang,” harapnya. (adv/and)

# Praktik Judi Online Harus Diperhatikan Serius, Jangan Timbulkan Masalah Sosial Baru

**TANJUNG REDEB** – Praktik judi online yang saat ini masih marak dilakukan masyarakat menarik perhatian berbagai pihak, tak terkecuali jajaran legislatif. Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo mengungkapkan, mengenai praktik judi online tersebut, harus ada pengawasan maksimal dari pihak terkait.

“Karena dampak dari judi online ini sangat berbahaya dan luas, bisa menyerang psikologis seseorang dan sebagainya,” ungkapnya.

Dirinya mencontohkan, judi online telah menyumbang angka perceraian di Kabupaten Berau, yakni mencapai 200 kasus. Sehingga dampak yang ditimbulkan sangat buruk. “Artinya banyak masyarakat Berau yang mengakses situs-situs judi online tersebut. Kita khawatir, dampaknya juga akan merambat kepada perbuatan kriminalitas,” tuturnya.

Dia meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau memperhatikan maraknya praktik judi online tersebut, sebab memicu persoalan privasi warga yang akan berdampak luas. “Saya kira sebagai upaya pencegahan maraknya praktik judi online ini, harus



Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo

ada pengawasan teknologis,” ujarnya.

Ditegaskan Falen, Diskominfo Berau harus aktif mengawasi situs-situs perjudian. Jangan sampai, kata dia, masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya. “Kita tidak ingin, akibat dampak buruk dari judi online ini bisa melahirkan masalah-masalah sosial baru,” imbuhnya.

Kendati demikian, politikus

Demokrat ini mengimbau masyarakat untuk lebih bijak menggunakan teknologi agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. “Sebaiknya lebih bijak memilih apa yang sebaiknya dilakukan dengan teknologi yang semakin maju. Dampaknya sangat banyak sekali, bahkan turunan dampaknya pun lebih banyak lagi,” tandasnya. (adv/and)

# Soroti Mandeknya Pembangunan Sentra Tahu dan Tempe

**TANJUNG REDEB** – Rencana pembangunan sentra tahu dan tempe di Kampung Tasuk, diketahui sedang mandek. Hal itu disorot Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung.

Diketahui, mandeknya rencana pembangunan sentra tahu dan tempe itu dikarenakan luasan lahan yang kurang mendapat perhatian.

Nurung menilai, hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, dari lima hektare lahan yang dibutuhkan, baru tersedia dua hektare.

Menurutnya, dengan adanya sentra tahu dan tempe tersebut sangatlah bagus. Di mana Kabupaten Berau akan memiliki tempat atau produksi satu atap, sehingga bisa lebih tertata.

“Ini program yang bagus, karena bisa tertata. Maka dari itu saya dukung juga adanya sentra tahu dan tempe ini,” terangnya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk lebih aktif dalam mengajukan pembebasan lahan, sehingga pembangunan sentra tahu dan tempe itu dapat segera terealisasi.

“Antar OPD terkait harus rajin berkoordinasi, sehingga realisasinya bisa berjalan,” tuturnya.

Meski belum bisa terealisasi pada tahun ini, Nurung meminta progres tersebut bisa berjalan dan tidak berhenti di perencanaan saja. “Jangan diam di tempat. Maka dari itu pemkab juga harus mencari solusi terkait dengan kekurangan lahan tersebut,” tandasnya. (adv/and)



Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung



Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto

## Dorong Pembangunan Jembatan Kelay jadi Prioritas

**TANJUNG REDEB** – Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto mengusulkan pembangunan Jembatan Kelay III diprioritaskan pada 2024 mendatang.

Dia mengatakan, pembangunan jembatan tersebut nantinya akan dilakukan secara bertahap. “Jembatan kelay III ini merupakan prioritas dari Komisi III. Dari usulan akan dilakukan bertahap dan langkah pertama akan dilakukan pembebasan lahan, kemudian dibangun pondasi dahulu,” katanya.

Dirinya mengungkapkan, anggaran yang akan dikucurkan nantinya terbilang cukup besar, yakni Rp 200 miliar hingga jembatan rampung dibangun.

Menurutnya, pembangunan secara bertahap karena untuk menekan beban anggaran dari Pemkab Berau nantinya. “Jadi langkah kami, sementara jembatan yang ada masih bisa dipakai, mungkin tahun ini akan dilakukan pondasi dahulu atau langkah pertama bisa dibebaskan lahan,” paparnya.

“Kita tidak sekaligus menganggarkan sebesar itu. Jadi tahap demi tahap agar tidak membebani APBD kita,” tandasnya. (adv/and)

## Harap Masyarakat di Sekitar Perkebunan Dapat Diakomodir

**TANJUNGREDEB** – Dengan disahkannya 4 Raperda menjadi Perda, salah satunya Perda Perubahan atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan pada rapat paripurna beberapa waktu lalu dinilai Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Suharno harus dapat mengakomodir masyarakat sekitar wilayah perkebunan.

Diamengakumenginginkan masyarakat disekitar perkebunan bisa mendapat manfaat perekonomian atas kehadiran perkebunan di wilayahnya. Salah satunya diberikan peluang untuk melibatkan masyarakat dalam mengelola limbah.

“Itu bisa menjadi sumber ekonomi yang baru untuk masyarakat perkebunan,” ungkap Suharno.

Selain itu diungkapkannya, tidak kalah penting agar Pemkab Berau mengkaji ulang untuk bisa memberi bantuan bibit sawit kepada masyarakat.

“Bantuan bibit kelapa sawit kepada masyarakat selama ini tidak pernah ada lagi. Padahal dengan bantuan bibit sawit tersebut, masyarakat sangat terbantu untuk meningkatkan perekonomian,” jelasnya.

Dengan disahkannya Perda Perubahan atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan tersebut, fraksi PPP menyetujui namun tetap berharap agar segala catatan yang diberikan oleh fraksi PPP menjadi perhatian bagi Pemkab Berau. (adv/and)



Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Suharno



Bupati KTT Ibrahim Ali saat melakukan monitoring pada salah satu lembaga pendidikan di KTT.

## Assesment Nasional Tingkat SD Tolak Ukur Kemampuan Siswa

TANA TIDUNG - Bupati KTT Ibrahim Ali, didampingi Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pendidikan, Irdiansyah gelar monitoring pelaksanaan assesment Nasional Tingkat Sekolah Dasar (SD), bertempat di SDN 013 Tana Tidung, Senin (23/10/2023) kemarin.

Disela monitoring tersebut, Ibrahim Ali menerangkan, assesment nasional merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.

"Informasi tersebut, diperoleh dari tiga instrumen utama. Berupa, assesment kompetensi minimum (AKM), survei karakter, serta survei lingkungan belajar," ungkapnya.

Dengan menggunakan metode pelaksanaan berbasis komputer, daring atau semi daring. Disamping itu, assesment nasional juga bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah.

"Berupa pengembangan kompetensi dan karakter murid," jelasnya.

Ibrahim berharap, dari hasil assesment tersebut dapat mendorong sekolah serta Dinas Pendidikan un-

tuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Utamanya, dalam hal peningkatan mutu pendidikan berkualitas di Kabupaten Tana Tidung.

Disisi lain, monitoring yang dilakukan bertujuan untuk memantau dan memberikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan assesment Nasional. Diharapkan, dalam pelaksanaan assesment tetap berlandaskan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.

Diterangkan, Ibrahim Assesment Nasional tingkat SD. Tidak hanya bertujuan untuk memotret pencapaian belajar kognitif peserta didik, tetapi juga dapat melihat hasil belajar secara emosional peserta didik.

"Termasuk dengan sikap, nilai dan juga keyakinan, serta perilaku sehingga dapat diprediksi soal perilaku peserta didik," tutupnya. (tin/and)

Editor: Andhika





Timsel calon anggota KPU Kaltara, saat mensosialisasikan tahapan dan pendaftaran calon anggota KPU Kaltara.

## Berikut Tahapan Seleksi Anggota KPU Kaltara

TANJUNG SELOR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) telah mengeluarkan pengumuman Nomor 107/SDM-12-Pu/04/2023. Tentang Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi di 5 Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota pada 43 Kabupaten/ Kota di 9 Provinsi.

Salah satunya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) beberapa nama timsel yang dicantumkan dalam pengumuman itu, diantaranya Ade Saktiawan Amirullah, Ahmatang, Mohammad Ilham Agang, Mohammad Ridwan dan Sugeng Supriyanto.

Hasil pleno tingkat Timsel, Ade Saktiawan Amirullah dipercayakan sebagai ketua Timsel, kepada wartawan dia menyampaikan soal tahapan seleksi calon anggota KPU Kaltara periode 2024-2029, telah resmi dibuka pengumuman pendaftaran pada 24-30 Oktober 2023.

Pendaftaran, 24-4 November, penelitian administrasi 24-11 November, perpanjangan pendaftaran 5-10 November, penetapan hasil penelitian administrasi 12-13 November, pengumuman hasil penelitian administrasi 14-16 November.

Kemudian, untuk seleksi tertulis dan psikologi 17-26 November, penetapan hasil seleksi tertulis dan psikologi 27-28 November, pengumuman hasil seleksi tertulis dan psikologi 29-30 November, masukan dan tanggapan masyarakat, 29-4 Desember, test kesehatan 1-3 Desember.

Wawancara 4-8 Desember, penetapan hasil test kesehatan dan wawancara 9-10 Desember, peng-

umuman hasil seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota 11-12 Desember, dan penyampaian nama calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota 11-13 Desember 2023.

"Tahapan ini, berdasarkan pada Keputusan KPU nomor 1397 tahun 2023," ujarnya.

Dikatakan, sebelum pendaftaran dibuka, mereka telah mengikuti Bimbingan teknis (bimtek) selama tiga hari di Jakarta. Bersamaan dengan lima Provinsi lain yang menggelar perekrutan anggota KPU di tingkat Provinsi. "Untuk pendaftaran dibuka melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIKBA)," tuturnya.

Selanjutnya, timsel akan melanjutkan tahapan sosialisasi ke Kabupaten

dan Kota di Kaltara. Adapun, jadwalnya sebagai berikut, ke Kabupaten Malinau pada 25 Oktober, KITT 26 Oktober, Kabupaten Bulungan 27 Oktober, Kota Tarakan 25 Oktober dan Kabupaten Nunukan 26 Oktober 2023.

"Seluruh kegiatan sosialisasi dilakukan di kantor KPU Kabupaten dan Kota, sedangkan untuk sekretariat timsel bertempat di Hotel Pangeran Khar Tanjung Selor," bebernya.

Melalui sosialisasi, diharapkan bisa dijangkau sebanyak mungkin oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan animo masyarakat dalam mengikuti seleksi KPU Provinsi di Kaltara. (tin/and)

Editor: Andhika





Wali Kota Tarakan, dr Khairul saat meresmikan Balai Penyuluh Pertanian.

ADE/MKR

# Hari Pangan Sedunia di Tarakan: Khairul Resmikan Balai Penyuluh Pertanian

**TARAKAN** - Wali Kota Tarakan, dr. Khairul meresmikan Balai Penyuluh Pertanian yang terletak di Karang Harapan, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (24/10/2023) pagi. Peresmian Balai Penyuluh Pertanian tersebut bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia yang mengangkat tema "Water is Life, Water is Food".

Khairul mengatakan dengan luas lahan yang hanya berukuran 250 kilometer persegi, Tarakan memiliki lahan terbatas. "40 persen untuk Hutan Lindung, Hutan Kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sehingga yang bisa digunakan hanya 60 persen dari luas lahan yang ada. Dikurangi lagi lahan wilayah kerja pertambangan dan wilayah pertahanan," ucap Khairul usai kegiatan peresmian, Selasa (24/10/2023).

Luas wilayah pertanian yang minim tersebut tidak diimbangi dengan jumlah penduduk. Dimana jumlah penduduk di Tarakan setiap tahunnya terus bertambah. Hal ini terjadi karena Tarakan merupakan kota transit sehingga pertumbuhan penduduk menjadi hal yang tidak terelakkan.

Untuk itu, dia berharap petani di Tarakan dapat memanfaatkan luas lahan yang ada. Salah satunya den-

gan memanfaatkan Balai Penyuluh Pertanian yang baru saja diresmikan. Khairul optimis, meskipun lahan di Tarakan tidak luas, produksi pertanian dapat dimaksimalkan jika diimbangi dengan teknologi. "Lahan bisa dioptimalkan dengan berbagai teknologi yang ada sehingga intensifikasi pertanian menjadi penting dan produksi bisa berlipat," ujarnya.

"Mudahnya kita bisa swasembada di beberapa produk. Saat ini sudah swasembada cabe, sayuran, kangkung dan sawi. Semuanya tidak kita datangkan dari luar," paparnya.

Menurutnya, potensi pertanian di Tarakan sangat memuaskan. Terbukti, dengan minimnya pemberitaan petani gagal panen. Terlebih, di Tarakan tidak memiliki cuaca ekstrem yang dapat mengakibatkan kekeringan selama berbulan-bulan.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan, Pertanian Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, Asmuni mengatakan, balai ini difungsikan sebagai tempat pelatihan para petani. "Tempat pelatihan bimbingan ke petani memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada petani dalam hal berusaha,"

ungkapnya.

Pelatihan tersebut meliputi budi daya, penelitian, bahkan peningkatan usaha bisnis untuk petani. Hasil pangan dari Balai Penyuluh Pertanian ini, kata dia, juga akan dijual secara umum kepada masyarakat. "Hasil produksi menghasilkan Pendapat Asli Daerah (PAD)," katanya.

Adapun jenis tanaman yang ditanam di Balai Penyuluh Pertanian, yakni hortikultura dan perkebunan. Tanaman perkebunan seperti sawo, rambutan, jeruk dan lain sebagainya. Sedangkan tanaman hortikultura meliputi sayuran, kangkung, dan lain sebagainya.

Dia berharap Balai Penyuluh Pertanian dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk mau memulai kegiatan pertanian. "Luas kebun contoh ini 500 meter persegi tidak sampai satu hektar. Namanya kebun contoh, kita berharap ini dapat jadi contoh masyarakat. Kalau pola penanaman ini bisa di bawa di rumah dengan memanfaatkan lahan lahan yang ada," pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika



ADE/MKR

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, Elang Buana.

## Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pastikan Tarakan Bebas dari Beras Plastik

**TARAKAN** - Masyarakat di seluruh Indonesia tak terkecuali di Kota Tarakan dalam beberapa hari ini dihebohkan oleh isu beras yang diduga mengandung bahan plastik. Hal ini buntut beredarnya video yang memperlihatkan beras diduga plastik di wilayah Aceh.

Menanggapi hal tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan memastikan tidak ada beras sintesis yang mengandung bahan plastik beredar di Tatarakan. Hal tersebut dipastikan setelah pihaknya melakukan pengawasan secara langsung di beberapa toko beras yang ada di Kota Tarakan.

"Itu isu yang dibuat orang iseng aja, selama ini teman teman di bidang ketahanan pangan selalu mendeteksi beras, apakah adakutu, apakah adabahan pengawet dan lain sebagainya. Tidak hanya beras Bulog namun juga beras lainnya. Selama ini kami tidak temukan, baik melalui uji lab ataupun secara kasat mata," ucap Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, Elang Buana, Selasa (24/10/2023).

Elang mengatakan tidak mungkin seseorang memproduksi beras plastik. Sebab, biaya produksinya lebih tinggi. Dia memastikan bahwa isu itu hoax atau berita bohong. Untuk itu, Elang menghimbau masyarakat tidak perlu khawatir sebab pihaknya rutin melakukan pengecekan.

Dia mengatakan ketersediaan stok beras di Tarakan relatif aman. Bahkan, stoknya aman hingga tiga bulan ke depan. "Di Tarakan ini tiga atau empat bulan ke depan beras pasti ada. Itu hanya dari Bulog saja belum yang lain," tegasnya.

Kendati demikian, dia tak menampik bahwa 98 persen kebutuhan beras di Tarakan masih bergantung kepada wilayah Jawa dan Sulawesi. "Sekitar 98 persen kebutuhan beras masih bergantung pada Jawa dan Sulawesi. Produksi beras di Tarakan masih sangat sedikit hanya cukup untuk 5 hari," kata Elang.

Elang menuturkan, jika Tarakan ingin swasembada beras maka diperlukan 3500 hektar lahan dengan lima kali panen dalam dua tahun. Dia

menyebut di Tarakan memiliki ribuan hektar, hanya saja belum dimanfaatkan untuk pertanian beras karena minimnya peminat. Menurutnya, Tarakan memiliki cukup air yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan produksi pertanian beras. Hanya saja para petani lebih memilih komoditas lain untuk ditanam.

"Para petani lebih banyak memilih komoditas mana yang lebih untung. Jadi lebih memilih petani sayur dibandingkan dengan petani tanaman pangan. Lebih banyak keuntungan petani sayur sehingga banyak petani memilih itu," ucapnya. Alasan lainnya mengapa petani di Tarakan lebih memilih menanam komoditas sayuran ketimbang beras, lanjut Elang, karena masa panen yang lebih cepat sehingga perputaran keuangan bisa lebih cepat. "Selain itu, produksi beras membutuhkan proses yang lebih panjang," pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya  
Editor: Andhika



Lepas Sambut Kepala Lapas Kelas IIA Tarakan.

ADE/MKR

## Kepala Lapas Kelas IIA Tarakan Resmi Berganti, dari Mohammad Ridwantoro ke Sutarno

**TARAKAN** - Kepala Lapas Kelas IIA Tarakan resmi berganti, dari Mohammad Ridwantoro ke Sutarno. Pergantian itu dilakukan melalui kegiatan Lepas Sambut yang digelar di Halaman Lapas Kelas IIA Tarakan, Selasa (24/10/2023) sore.

Usai ditetapkan sebagai Kepala Lapas Kelas IIA Tarakan yang baru, Sutarno menyebut akan melakukan mapping guna menentukan persoalan mana saja yang perlu didahulukan. "Kemudian yang jelas bahwa hak hak narapidana yang memenuhi syarat akan kita berikan sepenuhnya," ucapnya, Selasa (24/10/2023).

Dia menyebut akan melanjutkan program sebelumnya yang memberi dampak positif. Dia tak menampik salah satu kendala yang dialami Lapas di seluruh Kalimantan ialah over kapasitas. Untuk itu, Sutarno merencanakan akan melakukan pemindahan tahanan jika pembangunan Lapas di Tanjung Selor sudah dikerjakan. Hanya saja, dia enggan memberi kepastian kapan Lapas itu

akan dibangun sebab masih menunggu informasi dari pusat.

Sutarno menuturkan, pihaknya akan melanjutkan pembangunan peninggian pagar. Namun, pihaknya masih menunggu anggaran dari pusat. Hal ini menurutnya perlu dilakukan mengingat pagar yang ada di Lapas Tarakan terbilang rendah sehingga sangat beresiko. "Anggaran masih nunggu tahun depan apakah disetujui atau tidak nanti dari pusat. Tapi tetap akan kita upayakan untuk menambah kawat duri," ungkapnya.

Dia menegaskan pihaknya akan berkomitmen untuk melanjutkan program program yang sempat tertunda. Untuk itu, dia berharap sinergitas seluruh pihak untuk mewujudkan program tersebut. Menurutnya perlu ada keselarasan visi dan misi guna memajukan Lapas Kelas IIA Tarakan. Dia optimis segala persoalan yang ada di Lapas Tarakan akan segera diatasi jika ada kerjasama semua pihak.

Saat disinggung terkait banyaknya

narapidana kasus narkoba di Lapas Tarakan, dia menjelaskan ada wacana dari pusat yakni Menkopolhukam bahwa, pengguna narkoba akan diberi grasi. Kendati demikian, Sutarno menegaskan bahwa hal itu perlu asesmen dan rehabilitasi terlebih dahulu. "Kita masih menunggu tindak lanjut dari apa yang disampaikan Menkopolhukam," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Tarakan yang lama, Mohammad Ridwantoro mengucapkan selamat bertugas kepada Kalapas yang baru. Dia berharap semoga Kalapas yang baru mampu menjalankan amanah dengan semaksimal mungkin. "Semoga Kalapas Tarakan yang baru semakin baik dan tambah baik," ungkapnya. Diketahui, Mohammad Ridwantoro akan berpindah tugas sebagai Kepala Bidang Keamanan di Kanwil Aceh. (apc/and)

Reporter: Ade Prasestia  
Editor: Andhika



PASANG IKLAN HUBUNGI  
**0811 5405 033**

*Lebih Dekat dengan Satu Klik*



# **JOB FAIR BONTANG TERSEDIA 349 LOWONGAN KERJA**

**BACA HALAMAN 2-4**



**RURANT ADAT SEMPEKAT,  
BUPATI YAPAN SAMPAIKAN  
TERIMA KASIH UNTUK  
WARGA KUBAR  
BACA HALAMAN 28**



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Stand perusahaan-perusahaan yang mengikuti job fair di Kota Bontang.

# Tersedia 349 Lowongan Kerja di Job Fair Bontang

## Tekan Angka Pengangguran

BONTANG – Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang membuka Job Fair yang dilaksanakan sejak 24 Oktober hingga 27 Oktober 2023 yang diikuti 28 perusahaan, 1 BLKI dan 1 Lembaga Pelatihan Kerja dengan menyediakan 349 lowongan kerja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang, Abdu Safa Muha

mengatakan Job Fair kali pertama ini dilaksanakan oleh Disnaker Kota Bontang yang diperuntukkan bagi masyarakat Kota Bontang. Ia mengimbau kepada perusahaan dalam Job Fair ini agar perusahaan dapat mengikuti Job Fair 2023.

“Bukan hanya memberikan lowongan pekerjaan, namun juga mem-

berikan kesempatan untuk melaksanakan magang di perusahaan,” kata Safa Muha.

Ia mengatakan selama proses Job Fair, pelaksanaan layanan penempatan kerja Disnaker akan dilaksanakan di Job Fair. “Kita juga melakukan penilaian stand pada Job Fair yang telah dibuka,” katanya.

Safa Muha menambahkan Job Fair diikuti oleh 30 perusahaan dari berbagai perusahaan yang ada di Kota Bontang dengan menyiapkan sebanyak 349 lowongan pekerjaan. "Selepas dari Job Fair ini, agar ada yang dapat melakukan pemagangan di perusahaan," jelasnya.

Wakil Wali Kota Bontang, Najirah mengatakan Job Fair ini merupakan kegiatan yang sangat penting dilaksanakan sesuai dengan visi misi Kota Bontang. "Kota Bontang yang memiliki angka pengangguran se-

besar 7,21 persen, maka perlu dengan Job Fair ini dapat menurunkan angka pengangguran di Kota Bontang," jelasnya.

Pelaksanaan Job Fair, kata Najirah juga sebagai bagian bentuk pembinaan dalam kebutuhan pencari kerja di Kota Bontang.

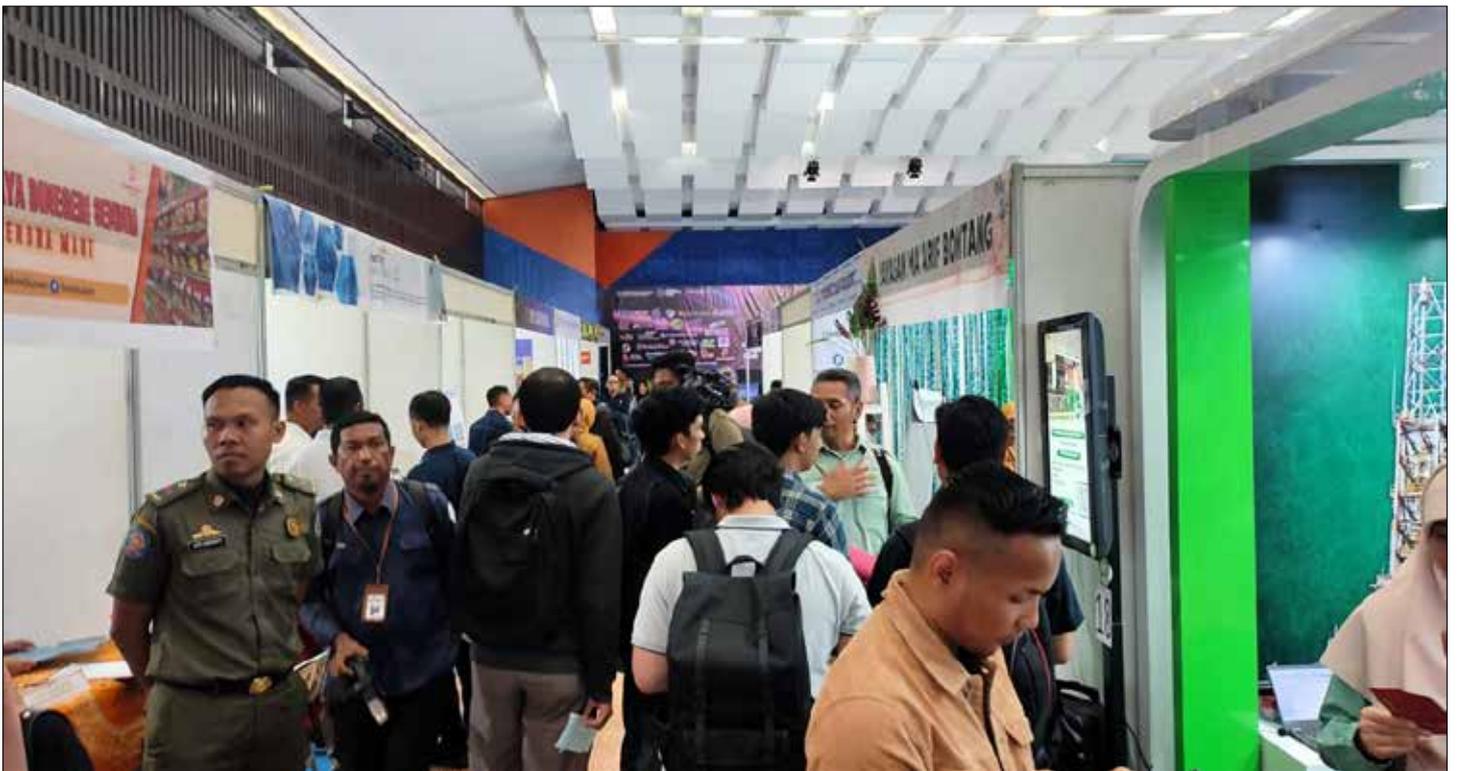
"Tentu ada penyebab terjadinya pengangguran karena beberapa faktor seperti kurangnya informasi kebutuhan kerja dan terbatasnya lowongan kerja. Selain kurangnya kebutuhan pekerja terampil," kata

Najirah, Selasa (24/10/2023).

Job Fair juga menjadi wadah komunikasi antar perusahaan dan pencari kerja yang akan mencari pekerja yang memiliki keterampilan, minat dan sesuai dengan kemampuan.

"Dengan pelaksanaan Job Fair ini akan memberikan informasi pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan kemampuan," ungkap Najirah.

Pewartu: Yahya Yabo  
Editor: Nicha Ratnasari



SYAKURAH/RADARBONTANG

Kondisi Job Fair hari Pertama.

## Job Fair 2023 Hari Pertama, Pencari Kerja Membludak

BONTANG - Job Fair 2023, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang sudah dipenuhi para Pencari Kerja (Pencaker) sejak pagi.

Kegiatan ini berlangsung mulai Selasa (24/10/23) hingga Jumat (27/10/23) mulai jam 08.00 - 19.00 Wita dan diisi oleh 30 perusahaan.

Kepala Disnaker, Abdu Safa Muha menjelaskan bahwa Job Fair ini pertama kali digelar oleh pihaknya. Sebelumnya sempat ada Job Fair di tahun 2022, namun kegiatan itu garapan disnakertrans provinsi.

"Job Fair kali ini murni kegiatan kita,

oleh sebab itu jika ada masukan atau saran agar kegiatan ini bisa menjadi agenda tahunan mohon bantuan, sehingga kedepan persiapan kami lebih matang," katanya

Tidak hanya lowongan kerja, LPK serta perusahaan juga membuka pelatihan dan magang, sehingga cocok untuk fresh graduate. Diketahui perusahaan tidak selalu membuka lowongan, sehingga dengan membuka lowongan magang bisa menambah skill untuk para pencaker.

Grace salah satu pencaker yang mengunjungi Job Fair ini cukup antusias dengan membawa beberapa

lamaran yang bisa ia ajukan ke banyak perusahaan. Ia mengaku bahwa mencari kerja di Bontang cukup sulit sehingga diharapkan Job Fair ini ia memiliki kesempatan untuk magang ataupun bekerja.

"Saya sudah apply beberapa, senang sih ada Job Fair gini, harapannya kegiatan ini bisa bermanfaat untuk saya dan pencari kerja lainnya," beryanya.

Penulis: Syakurah  
Editor: Nicha Ratnasari



SYAKURAH/RADARBONTANG

Lulyana Ramdhani, Kepala BNNK Bontang di Job Fair 2023.

## Surat Bersih Narkoba Jadi Syarat Pencaker

**BONTANG** - Job Fair garapan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang resmi dibuka. Event yang berlangsung di Gedung Koperasi Karyawan (Kopkar) PKT ini bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNNK) Bontang untuk mewujudkan Kota Bontang yang bebas narkoba.

Lulyana Ramdhani, Kepala BNNK Bontang menjelaskan, bahwa pihaknya bekerjasama dengan Disnaker karena pada job fair ini para petinggi perusahaan turut hadir, dan akan merekrut para pekerja, sehingga diharapkan kepeduliannya terhadap calon karyawan.

“Perusahaan-perusahaan harus peduli dengan SDM-nya, sehingga para pekerja harus memiliki surat keterangan bersih narkoba,” katanya, Selasa (24/10/23).

Hal ini sesuai dengan arahan dari kementerian tenaga kerja, yang mewajibkan tiap tahun melaksanakan tes narkoba di perusahaan kepada semua pegawai.

“Mulai sekarang kami mengharapkan, surat bersih narkoba menjadi salah satu persyaratan untuk berkas mencari pekerjaan,” tambahnya.

Pihaknya telah membuka stand di Job Fair juga, agar para pencari kerja (pencaker) tidak perlu jauh-jauh tes

urine di kantor BNNK. Untuk saat ini BNNK bergabung dengan salah satu stand yakni LPK Adjieradja. Adapun biaya yang harus dikeluarkan sekira Rp 290 ribu.

“Pencaker tes urine hari itu juga, dan akan langsung diberikan surat hari itu juga,” ungkapnya.

BNNK bertekad tidak hanya melakukan pemberantasan, tapi juga pencegahan terutama kepada SDM Kota Bontang, agar perusahaan lebih produktif dan tidak mencoreng nama perusahaan tersebut.

*Penulis: Syakurah*

*Editor: Yusva Alam*



**Koran DIGITAL**

MEDIA KALTIM.com

Lebih Dekat dengan Satu Klik



<http://koran.mediakaltim.com/>

INFO & PEMASANGAN IKLAN  
CP. 0811 5405 033

 media\_kaltim
  mediakaltimdotcom
  mediakaltim.com
  media kaltim



Kepala Bidang PKMF BPSDM Prov. Kaltim, Rina Kusharyanti, S.STP, M.M. saat memberikan sambutan panitia.

## BPSDM Kaltim Gelar Pelatihan Pengawas Ketenagakerjaan

**SAMARINDA** - Peningkatan kualitas pengawas tenaga kerja sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kaltim. Oleh sebab itu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menggelar pelatihan khusus untuk jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan di lingkungan pemerintah provinsi Kaltim.

Pembukaan pelatihan digelar pada Selasa (24/10/2023) di Aula Gedung Utama BPSDM Kaltim, Jalan HAM Rifadin, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda.

Hadir dalam acara, Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi dan Kepala Bidang PKMF BPSDM Provinsi Kaltim, Rina Kusharyanti, perwakilan dari Dinas

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Widyaswara BPSDM Kaltim dan para peserta pelatihan.

Kepala Bidang PKMF BPSDM Provinsi Kaltim, Rina Kusharyanti mengatakan pelaksanaan pelatihan akan dilaksanakan dari tanggal 24 - 28 Oktober 2023. Narasumber yang dihadirkan dari widyaswara BPSDM Kaltim dan Disnakertrans Kaltim, dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

"Kita telah membuka pelatihan bagi ASN Jabung pengawas ketenagakerjaan di lingkungan pemerintah provinsi Kaltim. Jumlah peserta atau pengawas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti kegiatan ini adalah 31 orang," paparnya.

Rina berharap kepada para peser-

ta mampu menjadi pengawas yang profesional dan mampu menjadi mediator bagi tenaga kerja dan pihak perusahaan.

"Semoga setelah pelatihan ini para peserta mampu menjadi mediator dalam menyikapi hubungan industrial yang ada di Kaltim," tutupnya.

Para peserta akan melakukan pelatihan secara classical atau tatap muka di Komplek pelatihan BPSDM Kaltim atau biasa disebut kampus "Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami" selama 5 hari ke depan dan setiap peserta yang lulus akan diberikan sertifikat. (ADV/BPSDM/Han)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim Dra Nina Dewi MAP saat membacakan sambutan Pj Gubernur Kaltim Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si

## Pemprov Kaltim Komitmen Tingkatkan Standar Ketenagakerjaan di Kaltim

**SAMARINDA**-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen akan terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia para pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan di Pemprov Kaltim.

Peningkatan kualitas pengawas tenaga kerja sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kaltim. Oleh sebab itu Pemprov melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, kembali menggelar pelatihan bagi jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan di lingkungan pemerintah provinsi Kaltim.

Hal ini dikatakan oleh Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi saat pembukaan Pelatihan Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan di lingkungan Pemprov Kaltim, pada Selasa (24/10/2023) di Aula Utama Kantor BPSDM Kaltim.

Atas nama Pemerintah Provinsi

Kaltim Pj Gubernur Kaltim, mengapresiasi kegiatan ini demi meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia para pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan di Pemprov Kaltim.

“Dalam dunia kerja yang terus berkembang dengan cepat, fungsi pengawasan ketenagakerjaan merupakan peran yang sangat penting,” ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri-RB Nomor 30 Tahun 2020, Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Selain itu tugas pengawas ketenagakerjaan juga untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dijaga dan keamanan serta kesehatan mereka di tempat kerja terjamin. Den-

gan tugas yang sangat krusial ini, diperlukan peningkatan kompetensi dan keahlian yang terus menerus. Itulah sebabnya, pelatihan teknis bagi jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sangat penting,” jelasnya.

Pj Gubernur berharap, dari pelatihan ini muncul pengawas-pengawas ketenagakerjaan yang profesional, kreatif dan inovatif dalam menjawab tantangan pembangunan kedepan.

“Seperti kita ketahui, tantangan kerja di masa depan dalam bidang apapun akan menjadi semakin berat. Terlebih dalam dunia ketenagakerjaan dengan kompleksitas permasalahan yang berkembang secara dinamis, pengawas ketenagakerjaan harus selalu siap menghadapi potensi perkembangan isu, seperti isu IKN dan isu pembangunan di Kaltim, serta masalah sehingga tercipta analisis masalah dan pemecahannya secara tepat,” tutupnya. (ADV/Han/BPSDM)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari

# Kepala BPSDM Kaltim Sebut 7 Poin Penting dalam UU ASN Terbaru

**SAMARINDA** - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Dra Nina Dewi MAP menyebutkan Revisi Undang-Undang ASN telah resmi disahkan oleh pemerintah sejak tanggal 3 Oktober 2023. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada acara sharing Session ke-44 BPSDM Kaltim secara daring pada Selasa (24/10/2023).

Dia juga mengatakan terdapat 7 hal yang dituangkan dalam UU ini. Antara lain, transformasi rekrutmen dan jabatan ASN yang dibuat lebih fleksibel dan kompetitif, kemudahan mobilitas talenta nasional, percepatan pengembangan kompetensi, penataan tenaga non-ASN, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, digitalisasi manajemen ASN dan penguatan budaya kerja dan citra institusi.

"Revisi ini sebagai upaya mempercepat pelaksanaan transformasi

manajemen ASN untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia. Secara umum perlu menjadi perhatian bersama agar tidak perlu berlama-lama karena maksimal 6 bulan sudah harus dibentukkan peraturan pelaksana" ujarnya.

Dijelaskan, perubahan-perubahan tersebut di satu sisi disebut positif sebagai payung hukum bagi manajemen ASN dan honorer. Namun di satu sisi juga bisa menimbulkan polemik jika tidak diimbangi dengan komitmen yang kuat dan kemampuan fiskal pemerintah.

"Oleh karenanya, sosialisasi mengenai Revisi UU ASN harus bisa memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengawal dan mengawasi pelaksanaan Revisi UU ASN di lapangan," harapnya.

BPSDM Kaltim optimis untuk terus meningkatkan kualitas pengetahuan baik ASN dan masyarakat umum

melalui berbagai metode salah satunya Sharing Session.

*Pasal-pasal krusial dalam Revisi UU ASN, antara lain :*

1. Larangan bagi instansi pemerintah merekrut tenaga honorer semenjak Revisi UU ASN dan penataan tenaga honorer paling lambat Desember 2024.
2. Kesetaraan hak dan kewajiban antara pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK);
3. TNI-POLRI bisa mengisi jabatan tertentu di ASN;
4. Pemberhentian tidak hormat ASN yang menjadi anggota partai politik. **(ADV/Han/BPSDM)**

*Pewarta : Hanafi*

*Editor : Nicha Ratnasari*

## BPSDM Kaltim Sosialisasikan UU ASN Terbaru

**SAMARINDA** - Sebagai upaya memberikan pemahaman kepada Aparat Sipil Negara (ASN) di Kalimantan Timur (Kaltim) terkait esensi dari Undang Undang (UU) ASN terbaru, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim, gelar Sharing Session ke-44 dengan tema "Titik Kritis Manajemen ASN dan Honorer Dalam Revisi UU ASN" yang diselenggarakan secara online melalui media sosial yakni aplikasi Zoom Meeting dan Aplikasi YouTube.

Sharing Session ke-44 dimulai pukul 10.00 Wita dan dibuka secara umum. Setiap peserta yang menyaksikan akan diberikan sertifikat oleh BPSDM Kaltim secara online atau berupa E-Sertifikat.

Acara dibuka langsung oleh Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi, dari ruangan studio kantor BPSDM Kaltim.

Tercatat pada awal dibuka, kegiatan ini diikuti 222 peserta dan berkembang hingga akhir acara menjadi 490 peserta. Peserta bukan hanya dari ASN yang berada di Kaltim tapi juga yang berada di luar Kaltim.

Nina Dewi pun bersyukur atas terselenggaranya Sharing Session untuk kesekian kalinya ini, dan berkomitmen akan terus mengupayakan agar Sharing Session BPSDM Kaltim akan terus dilakukan agar mampu mencetak ASN yang berkualitas.

"Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas ridho dan rahmatNya pada hari ini kita dapat berkumpul secara Virtual di acara Sharing Session dengan Tema "Titik Kritis Manajemen ASN dan Honorer dalam Revisi UU ASN," sapanya.

Menurutnya, sosialisasi mengenai UU ASN terbaru ini

harus bisa memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengawal dan mengawasi pelaksanaan UU ASN di lapangan.

"Bapak/ Ibu hadirin yang kami Hormati, Kami tetap Optimis Untuk Terus meningkatkan Kualitas Pengetahuan baik ASN dan Masyarakat umum melalui berbagai metode salah satunya Sharing Session ini. Besar harapan kami, agar Bapak/ Ibu para peserta dapat menyerap materi dengan sebaik baiknya," pintanya. **(ADV/Han/BPSDM)**

*Pewarta : Hanafi*

*Editor : Nicha Ratnasari*



**Kepala BPSDM Kaltim Dra Nina Dewi MAP saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Sharing Session ke-44 dengan tema "Titik Kritis Manajemen ASN dan Honorer Dalam Revisi UU ASN" secara daring.**



Staf Administrasi penerimaan, Susanti saat berada di Kantin Kejujuran Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami.

## Ada Kantin Kejujuran di BPSDM Kaltim

**SAMARINDA** - Setiap tahun ribuan orang mengikuti pelatihan di kampus "Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami" nama lain dari tempat pelatihan BPSDM Kaltim. Para peserta yang mengikuti pelatihan di sini, banyak yang datang dari luar kota Samarinda yang jaraknya bisa sampai 6 jam atau lebih dari ibu kota Kalimantan Timur itu.

Tak jarang para peserta harus tinggal di gedung asrama yang telah disediakan oleh BPSDM Kaltim. Karena harus mengikuti pelatihan secara classical atau tatap muka di sana untuk beberapa hari.

Tentunya bagi peserta yang tinggal di asrama pasti memerlukan banyak kebutuhan dan keinginan berbelanja. Namun lokasi mini market sangat jauh. Kondisi ini membuat BPSDM Kaltim berinisiatif membangun sebuah kantin yang sekaligus melatih mental kejujuran para peserta dan para pekerja di BPSDM Kaltim.

Namanya Kantin Kejujuran Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami. Nama yang disematkan sengaja

mirip dengan tempat keberadaannya di tempat pelatihan BPSDM Kaltim. Kantin ini buka 24 jam dan tidak dijaga. Kantin ini dikelola langsung oleh BPSDM Kaltim.

Staf Administrasi Penerimaan, Susanti, menyebutkan kantin kejujuran ini adalah ide dari Widyaswara Ahli Utama BPSDM Kaltim Muclis Syahrani.

Kantin kejujuran ini menyediakan makanan, minuman dan perlengkapan mandi seperti sabun, pasta gigi dan sampo yang biasa dijual di mini market. Setiap barang jualannya sudah tertulis harganya di etalase dan lemari pendingin.

"Di sini ada mie instan, ada kopi instan. Jika mau air panas kami sediakan dispenser buat air panas, dan minuman dingin di showcase. Jika pembeli ingin bayar, di atas etalase disediakan kotak untuk memasukkan uang bayar," ujarnya.

Alasan dibukanya kantin kejujuran agar memudahkan para peserta jika ingin berbelanja makanan atau minuman, dan tidak harus mencari atau berbelanja keluar komplek per-

kantoran.

"Iya karena mini market kan jauh, jadi kita sediakan di sini. Lagipula di sini jugakan ada taman buat nongkrong, dan kantin ini diperuntukan buat pekerja di sini dan peserta yang sedang mengikuti pelatihan," ungkapnya.

Tidak merinci besaran pendapatan, Susanti menyebutkan setiap pendapatan selalu diputar kembali untuk dibelikan barang yang ingin dijual kembali di kantin kejujuran.

"Hasilnya kita putarkan kembali untuk beli barang untuk dijual kembali di Kantin Kejujuran," tutupnya.

Untuk diketahui, Kantin Kejujuran ini lokasinya di dalam komplek perkantoran BPSDM Kaltim, tepatnya di samping ruang kelas pelatihan dan di samping taman yang berada di tengah-tengah komplek pelatihan BPSDM Kaltim. (ADV/Han/BPSDM)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Drs. Edi Damansyah, M.Si - H. Rendi Solihin  
Bupati & Wakil Bupati Kutai Kartanegara

Dafip Haryanto, S.Sos, M.Si  
Kadis Kominfo Kutai Kartanegara



Wabup Kukar, Rendi Solihin

## Pembangunan Pabrik Rumput Laut Terus Dikebut Pemkab Kukar

**TENGGARONG** - Tidak hanya genar mengembangkan sektor hulu dari komoditas rumput laut saja. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), juga terus mempersiapkan sektor hilirnya. Dengan membangun pabrik pengolahan rumput laut, menjadi produk setengah jadi.

Pembangunan pabrik ini, diharapkan mampu memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi para petaninya. Dengan berbagai macam

olahan produk setengah jadi, maka bisa dipasarkan hingga ke luar negeri. Tidak terbatas di dalam negeri saja. Sehingga keberadaan pabrik ini diharapkan bisa membuat petani rumput laut menjadi lebih mandiri.

"Untuk menunjang hilirisasi budi daya rumput laut, akan dibangun pabrik rumput laut yang akan beroperasi di Muara Badak," ungkap Wakil Bupati (Wabup) Kukar, Rendi Solihin.

Namun Pemkab Kukar pun tidak berfokus pembangunan pabrik saja.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan pun jadi perhatian orang nomor dua di Kukar ini. Sehingga memudahkan mobilisasi ketika memang pabrik pengolahan rumput laut tersebut benar-benar terwujud.

"Ini tak mungkin terjadi tanpa dukungan semua pihak termasuk masyarakat," tutup Rendi. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i



RAFI'/MEDIA KALTIM

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara, Linda Juniarti.

## DBH Sawit Sebesar Rp 19,7 M untuk Bangun Jalan Kawasan Sawit di Muara Badak

**TENGGARONG** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kukar 2023, mendapatkan kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) sektor perkebunan kelapa sawit. Yakni senilai Rp 19,7 miliar dari pemerintah pusat.

Dijelaskan Kabid Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar, Linda Juniarti, anggaran dari pemerintah pusat tersebut, akan dipergunakan untuk membangun infrastruktur jalan kawasan pertanian. Terutama kebun kelapa sawit milik masyarakat di kecamatan penghasil.

"Untuk pembangunan jalan menu-

ju perkebunan sawit yang masuk SK bupati Kukar, di Kecamatan Muara Badak," ujar Linda.

Hasil koordinasi dengan Dinas Perkebunan (Disbun) Kukar, ada dua paket pengerjaan yang akan dikerjakan. Yakni rekonstruksi jalan di Desa Badak Mekar dan rekonstruksi jalan Desa Suka Damai. Namun karena anggaran tersebut berasal dari pemerintah pusat, ada beberapa mekanisme yang harus dijalani oleh DPU Kukar.

Seperti asistensi ke Kementerian PUPR. Hasilnya, usulan jalan kawasan perkebunan kelapa sawit di dua desa yang diajukan, disetujui oleh pemerintah pusat.

Tetapi, kegiatan tersebut dipastikan oleh Linda akan diundur pada tahun 2024 mendatang. Lantaran waktu pengerjaan yang singkat, jelang tutup tahun anggaran. Selain adanya surat edaran dari sekretaris kabupaten (sekkab) Kukar yang membatasi waktu lelang pada Oktober 2023 ini, juga karena terkendala pemenuhan bahan material pengerjaannya.

"Kita sudah sepakat dan koordinasi dengan Disbun Kukar, pengerjaan di 2024. Karena dari pusat ini menyalurkannya pada APBD-P, jadi sangat singkat dan mepet," tutup Linda. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

# Rp 869 M untuk Peningkatan Jalan dan Jembatan di 2023

**TENGGARONG** - Peningkatan jalan menjadi berstatus mantap, menjadi salah satu pekerjaan penting yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kutai Kartanegara (Kukar). Memastikan masyarakat yang berada di 20 kecamatan, bisa merasakan nikmatnya akses jalan yang baik. Salah satunya untuk melancarkan arus mobilitas barang dan manusia.

Kepala Bidang Bina Marga, DPU Kukar, Linda Juniarti, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kukar terkait panjang jalan di Kukar. Ada jalan sepanjang 2.193,02 kilometer (km) milik Kukar, dengan 655 ruas jalan. Dimana baru 61,68 persen yang berstatus mantap, atau 1.352,65 km. 38,32 persen sisanya berstatus tidak mantap, atau sepanjang 840,37 km.

Diakui, DPU Kukar tidak bisa langsung mengerjakan itu semua, hingga menjadi 100 persen mantap. Secara bertahap, berdasarkan ketersediaan anggaran yang ada tiap tahun-

nya. Seperti halnya pada APBD Kukar 2023, DPU Kukar kebagian Rp 869 miliar untuk penyelenggaraan jalan dan jembatan. Diantaranya pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan.

"Kalau tahun ini kita kebagian dana Bankeu, DAU dan DBH. Tidak ada kebagian DAK untuk penyelenggaraan jalan," ujar Linda, Selasa (24/10/2023).

Dilanjutkan Linda, untuk dana Bankeu yang berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), Kukar mendapatkan kucuran senilai Rp 15 miliar. Diperuntukkan bagi 4 kegiatan, yang berupa rekonstruksi dan rehabilitasi jalan. Masing-masing untuk rekonstruksi Jalan Desa Batu-batu-Desa Sallo Cela, rekonstruksi jalan Kecamatan Muara Muntai, rehabilitasi jalan Kecamatan Sebulu, dan rehabilitasi Jembatan Rantau Hempang Muara Kaman.

Sementara Dana Alokasi Umum (DAU), Kukar mendapatkan anggaran

senilai Rp 15,8 miliar. Terbagi dalam 7 paket pengerjaan yang hanya fokus pada rehabilitasi jalan saja. Yakni rehabilitasi Jalan Betutu Tenggarong, pembangunan drainase di Kelurahan Sangasanga Dalam dan Desa Sarijaya, rehabilitasi jalan Kecamatan Marangkayu, rehabilitasi jalan Desa Loleng, rehabilitasi jalan Desa Purwajaya, rehabilitasi jalan penghubung di Desa Menamang Kanan, rehabilitasi jalan poros Desa Loa Janan Ulu. Dimana seluruh paket pekerjaan rampung 100 persen. Dan terakhir alokasi DBH yang berasal kelapa sawit, Kukar mendapatkan jatah Rp 19,7 miliar.

Penyelenggaraan jalan dan jembatan, dipastikan Linda akan terus berjalan pada 2024 mendatang. Dengan proyeksi anggaran yang masuk ke Bidang Bina Marga, yang diproyeksi mencapai Rp 1,3 triliun. Meningkatkan hingga Rp 500-600 miliar. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i



LET'S GO BEYOND



## BOOKING THS SAJA

# BTS

di Digiroom



Kode Promo  
**BTSOLI**

DAPATKAN GRATIS 1<sup>st</sup> OLI TMO SYNETIC SETIAP SERVICE BERKALA\*



THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel



Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan  
Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

\*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA :

Adi S : 0822-5435-0088



Urusan Toyota lebih mudah!



Bontang



Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman

## Agar Anggaran untuk Pertanian Tepat Sasaran, Dorong Pemerintah Lakukan Pemetaan

**TANJUNG REDEB** - Sektor pertanian dinilai Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman harus diberi perhatian khusus agar semakin berkembang. Dia menuturkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus melakukan pemetaan untuk sektor pertanian. Tujuannya supaya anggaran yang dikucurkan tepat sasaran.

"Contonya seperti pariwisata kita, mulai terarah karena adanya pemangku kebijakan yang sering mendiskusikan hal tersebut," ungkapnya.

Menurut Sakirman, seharusnya sektor pertanian dapat mencontoh hal itu. Dia sendiri sudah meminta kepada OPD terkait untuk segera membuat pemetaan dan masterplan di sektor pertanian.

Setelah ada masterplan, tambah

Sakirman, selanjutnya dilakukan sosialisasi terkait lahan persawahan mana saja yang tidak boleh dialihfungsikan. Maka, setiap kampung juga perlu diarahkan untuk menanam komoditas yang berpotensi di kampung masing-masing. Sehingga tidak semua kampung menanam komoditas yang sama.

"Kalau berbeda sentranya tentu bisa menjaga stabilitas harga di pasar. Ketika panen raya semua produksi bisa dijual tanpa ada yang terbuang," jelasnya.

Diungkapkannya, adapun program penunjang sektor pertanian yang rutin dilakukan Pemkab Berau yakni pembangunan irigasi pertanian. Yang mana saat ini juga sedang berjalan baik rehabilitasi maupun pembersihan irigasi. Salah satunya di

Kampung Buyung-buyung dan Kampung Semurut Kecamatan Tabalar.

Anggarannya bersumber dari APBD Berau. Beberapa pekerjaan juga dikerjakan menggunakan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DHBDR) tahun ini.

Makanya, Sakirman berharap pemerintah daerah dapat melakukan pemetaan sektor pertanian agar semua anggaran yang mengalir untuk Kabupaten Berau bisa tepat sasaran. Pun merata diberikan kepada kampung yang memiliki sentra pertanian. "Jangan sampai antar OPD programnya bertabrakan. Misalnya, DPUPR membuat program di salah satu kampung, ternyata Distanak juga membuat program yang sama di sana," tandasnya. (adv/dez)

# Nilai Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban, Direktur Bhakti Praja Diminta Presentasikan Peta Bisnis

**TANJUNG REDEB** - Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bhakti Praja diminta Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo mempresentasikan peta bisnisnya.

Dia menerangkan, presentasi peta bisnis dibutuhkan untuk mempercepat penyertaan modal yang dibutuhkan agar dapat segera dicairkan.

"Supaya rencana bisnis dan produksinya yang dalam skala besar itu diketahui secara detail, karena DPRD sudah mendukung berjalannya bisnis Perumda Bhakti Praja," katanya.

Dijelaskan Falen, peta bisnis yang dipresentasikan juga menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Terlebih, proposal yang masuk ke DPRD sekisar Rp 2 miliar.

"Makanya saya sempat bilang panggil Direktur Bhakti Praja itu untuk sam-

paikan anggaran Rp 2 miliar itu mau buat apa, sebelum disetujui. Kalau ini kurang, ditambahkan," terangnya.

Penjelasan tersebut dinilai perlu untuk disampaikan secara transparan. Mengingat banyak produk bisnis yang dipasarkan berdasarkan a1 rencana bisnis yang dimiliki. "Diperlukan juga pembelanjaan supaya belanja-belanja yang dilakukan tidak hanya membuang-buang anggaran," tegasnya.

Dengan demikian, Falen meminta Pemkab Berau untuk memperjelas peta bisnis perusahaan tersebut. Sebab dari awal sebelum pemilihan direksi, perusahaan itu dibiarkan berjalan sendiri, bahkan tanpa penyertaan modal.

"Dari awal perusahaan itu sudah siap tidak ada penyertaan modal. Makanya perlu dipresentasikan dulu sesuai proposal yang masuk," tutupnya. (adv/dez)



Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo

# Sambut Positif Adanya Mobil Penyedot Lumpur

**TANJUNG REDEB** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau beberapa waktu lalu berhasil mengoperasikan mobil penyedot lumpur. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah mengaku sangat mengapresiasi langkah tersebut, karena dapat mengurangi lumpur yang ada pada drainase.

"Saya apresiasi apalagi di tengah usulan masyarakat yang memang menginginkan drainase mereka dibersihkan," ungkapnya.

Ia menyebut, di wilayah perkotaan banyak drainase yang tersumbat akibat penumpukan lumpur dan sampah, sehingga memengaruhi debit air yang masuk.

"Kalau lumpur atau sampah menumpuk, tentunya itu mengganggu mengalirnya air ke anak sungai, yang bisa saja menyebabkan banjir," ujarnya.

Dengan berjalannya alat penyedot lumpur tersebut diharapkan Syarifatul dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Khususnya bagi lingkungan warga yang berada di gang-gang dan drainasenya penuh lumpur.

Di samping itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kerja bakti. Karena kerja bakti juga untuk kepentingan masyarakat.

"Terkait alat ini Saya harapkan supaya digunakan dengan sebaik-baiknya," harapnya.

Ia mencontohkan seperti di lingkungan RT 01 Kelurahan Gayam yang telah mengalami pendangkalan drainase. Ia meminta OPD terkait untuk segera melakukan penyedotan lumpur di sana. Pasalnya jika hujan deras, beberapa rumah warga di Kelurahan Gayam akan tergenang air hingga yang terparah setinggi lutut orang dewasa.

"Pun lingkungan sekitarnya yang masih ada yang tergenang air menjadi prioritas penyedotan lumpur. Di samping upaya mengalirkan air biar turun ke bawah sehingga ketika hujan cepat surutnya dan tidak menggenang sehari-hari," jelasnya.

Syarifatul berharap, mobil penyedot lumpur tersebut dapat efektif mengatasi permasalahan banjir akibat penumpukan lumpur pada saluran drainase.

"Masyarakat juga harus aktif jika memang daerahnya susah untuk dibersihkan sendiri untuk melapor kepada OPD yang bertugas," tandasnya. (adv/dez)



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah

# Madri: untuk Ketahui Kebutuhan BBM, Harus Ada Kajian Mengenai Jumlah Penduduk dan Kendaraan

**TANJUNG REDEB** – Adanya Surat Edaran (SE) Bupati mengenai larangan pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) ditanggapi Ketua DPRD Berau, Madri Pani. Dia menilai, dengan keluarnya SE Bupati tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus mengevaluasi hal itu bersama dengan pihak terkait.

Dijelaskan Madri, evaluasi penting dilakukan agar mengetahui permasalahan yang terjadi mengenai BBM di Bumi Batiwakkal.

“Seharusnya Kabag Ekonomi turun ke lapangan untuk mengecek BBM langsung ke Jobber yang ada di Samburakat. Bahkan saya pernah melakukan sidak, namun dianggap sepele, padahal sangat berdampak sekarang,” ujarnya.

Dirinya menerangkan, untuk mengetahui kebutuhan BBM masyarakat umum hingga sektor pertanian dan perikanan, seharusnya ada kajian mengenai jumlah penduduk dan kendaraan.

Dibeberkannya, SPBU yang ada di Berau sejumlah 14 SPBU. Namun

kuota yang didapatkan Berau jauh lebih sedikit daripada Bulungan yang hanya 4 SPBU. “Hal Itu yang harus diwaspadai dan dipertanyakan. Pemkab juga harusnya mengkaji berapa jumlah penambahan kendaraan roda dua maupun roda empat setiap tahunnya,” tegasnya.

Madri juga menyinggung soal larangan penjualan BBM eceran. Padahal, kata dia, hal tersebut membantu masyarakat memperoleh BBM dalam 24 jam. Terlebih saat ini, di Berau belum ada SPBU yang buka 24 jam.

“Tetapi pihak SPBU tidak bisa disalahkan sepenuhnya, kenapa tidak beroperasi 24 jam, sedangkan jatah BBM saja masih kurang. Dengan adanya pengetab ini saya rasa membantu masyarakat yang membutuhkan BBM pada malam hari,” tuturnya.

Dirinya berharap, pemerintah segera memberi solusi dan mengevaluasi persoalan yang terjadi saat ini. “Terutama soal BBM. Ajak seluruh pihak dan instansi terkait untuk diskusi agar persoalan ini ada jalan keluarnya,” tandasnya. (adv/dez)



Ketua DPRD Berau, Madri Pani

# Program Ketahanan Pangan, Harus Berdampak Langsung ke Masyarakat



Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya

**TANJUNG REDEB** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau didorong jajar legislatif untuk menambah program yang fokus terhadap ketahanan pangan. Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya menuturkan, program ketahanan pangan harus berdampak langsung terhadap masyarakat.

“Salah satunya dengan membedah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 karena masih sangat kurang,” ungkapnya.

Dijelaskannya, keberpihakan pemerintah untuk program ketahanan pangan masih kurang. Padahal, dengan anggaran daerah yang saat ini cukup besar, seharusnya porsi untuk dinas terkait seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, bisa lebih besar. Agar program yang dibuat bisa lebih banyak.

“Porsi anggaran lebih agar di-

nas terkait bisa menjalankan program misal, memberikan bantuan langsung ke petani berupa pupuk, benih dan lainnya, agar bisa langsung dirasakan manfaatnya,” tegasnya.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), dari 7 kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Berau memiliki ketahanan pangan tertinggi. Bapanas mengukur indeks ketahanan pangan di kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia berdasarkan sembilan indikator utama.

Berbagai indikator itu kemudian diolah menjadi skor berskala 0-100. Semakin tinggi skornya, ketahanan pangan suatu daerah diasumsikan semakin baik. Dengan metode tersebut, Kabupaten Berau meraih skor 86,16 pada 2021, paling tinggi di antara kabupaten-kabupaten tetangganya. (adv/dez)



## Komisi I Gelar RDP Bersama Aliansi Masyarakat Loa Kulu

**SAMARINDA**-Komisi I DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Masyarakat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di ruang rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim.

RDP tersebut dilakukan dalam rangka membahas permohonan enclave izin Hak Guna Usaha (HGU) PT. Budi Duta Agro Makmur (BDAM) di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kukar.

Memimpin rapat, Ketua Komisi I, Baharuddin Demmu didampingi Anggota Komisi I diantaranya Harun Al Rasyid, Kaharuddin Jafar, Agus Aras, dan Jahidin. Baharuddin Demmu mengatakan dalam pertemuan ini dibahas mengenai permintaan masyarakat tentang HGU PT. BDAM untuk di-enclave. "Yang diminta oleh masyarakat itu di surat adalah kurang lebih 280 hektare," sebutnya.

Politisi PAN ini mengatakan bahwa lahan tersebut sudah bisa dikategorikan menjadi lahan terlantar dan pemerintah seharusnya mencabut HGU PT. BDAM supaya bisa dikelola oleh masyarakat.

Ia mengungkapkan, dari pertemuan tersebut, belum didapatkan titik temu, sehingga Komisi I akan me-

ngundang kembali manajemen PT. BDAM yang tidak hadir dalam pertemuan untuk bisa memberikan klarifikasi terkait perlakuan perusahaan terhadap masyarakat Loa Kulu.

"Salah satu yang harus mereka klarifikasi adalah apakah mereka juga melakukan Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) dengan masyarakat, dan apakah mereka menggunakan lahan itu untuk aktivitas tambang yang diduga melanggar izin HGU mereka," ucap Baharuddin.

Ia menyebut, selama ini masyarakat merasa tidak dihargai oleh pihak PT. BDAM karena bukan masyarakat yang menguasai HGU mereka, namun sebaliknya. Padahal, lanjutnya, masyarakat sudah tinggal di wilayah itu sudah turun temurun sebelum adanya izin PT. BDAM pada tahun 1981.

"Masyarakat juga tidak pernah mendapatkan hak ganti rugi dari perusahaan. Ini menjadi catatan kita di Komisi I, bahwa Budi Duta harus dipanggil kembali untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan di wilayah izin HGU mereka," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa Komisi I berencana akan melakukan kunjungan lapangan dalam waktu dekat ini un-

tuk mengecek secara langsung terhadap kondisi lahan dan masyarakat yang berada di wilayah tersebut.

Kemudian ia menegaskan, apabila masyarakat tidak punya sertifikat, maka pemerintah harus membantu untuk dibuatkan sertifikat secara gratis. Dan untuk menjadi perhatian, bahwa masyarakat tinggal di sana turun temurun serta berhak atas tanah itu. "Saya tidak perlu bicara sertifikat untuk masyarakat. Ya kalau masyarakat tidak punya sertifikat tanah, maka itu kewajiban pemerintah untuk menerbitkan sertifikat gratis," tandasnya.

Selanjutnya, ia menyambut baik atas kebijakan Kementerian ATR/BPN bahwa perubahan status tanah dari HGU menjadi SHM itu gratis dan tidak dikenakan biaya. Namun ia menyayangkan bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terhambat karena banyak lahan masyarakat yang sudah ada izin HGU. "Bahkan ada beberapa lahan masyarakat yang sudah bersertifikat, itu ditindih atau berlapis oleh HGU," pungkasnya. **(Adv/DPRDKaltim)**

Pewarta : Andi Desky  
Editor : Nicha Ratnasari

# Legislator Dapil Balikpapan Soroti Antrean BBM di Kaltim

**SAMARINDA** - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur Mimi Meriami BR Pane, menyoroti antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih terjadi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sejumlah Kabupaten/Kota di Kaltim.

Mimi mengungkapkan, beberapa SPBU masih terlihat antrean panjang. Padahal Kaltim merupakan salah satu provinsi penghasil minyak dan gas bumi (migas). Ironinya Kaltim, masih saja tak mendapat suplai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat.

"Berbagai wilayah Kalimantan Timur, beberapa SPBU masih sering terjadi antrean panjang," ungkap Politisi PPP ini, Selasa (24/10/2023).

Semisal di Dapilnya, yakni Kota Balikpapan. Meskipun perusahaan plat merah sektor migas beroperasi di sana, tak menjadi garansi bahwa kebutuhan BBM di Kota Beriman selalu terpenuhi. Justru sebaliknya, antrean panjang di beberapa SPBU, sering ditemuinya.



DOKUMEN

## Antrean panjang di salah satu SPBU di Kaltim.

"Masih sering terlihat antrean panjang di kota Balikpapan yang terkenal sebagai kota minyak," bebernya.

Untuk itu ia mendorong pemerintah menyikapi persoalan BBM di Bumi Etam. Menurutnya kebutuhan BBM tak boleh diacuhkan oleh pemerintah pusat, mengingat mobilisasi mas-

arakat yang terus meningkat setiap harinya. (Eky/Adv/DPRD Kaltim)

Pewartu : Andi Desky  
Editor : Nicha Ratnasari

# Soroti Soal Perundungan, Ketua Fraksi PKS: Tugas Semua Pihak untuk Pencegahan

**SAMARINDA**-Maraknya kasus bullying atau perundungan ditanggapi serius oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim Ali Hamdi. Menurutnya, perlu langkah pencegahan yang melibatkan semua pihak.

Ali Hamdi menyatakan, bahwa perundungan dapat berdampak serius ke korbannya. Bahkan, tak sedikit yang berujung pada kematian akibat perundungan. Bagi pelaku juga bisa berakibat buruk mulai dari gangguan mental, merusak karakter dan kecerdasan.

Mengingat banyak kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan, menurutnya, bullying harus dicegah dengan kerjasama semua pihak. "Lembaga pendidikan harus menjadi lingkungan yang bebas dari perilaku ini, karena bullying bukan hanya tanggung jawab guru saja melainkan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat," terangnya.

Upaya konkret untuk pencegahan perundungan, sebutnya, adalah pendidikan karakter yang dimulai dari lingkungan rumah. Orang tua harus bisa menjadi teladan bagi anak. Pun begitu dengan guru di lingkungan sekolah, harus bisa menjadi orang tua kedua yang membimbing anak.

Mengingat dampak bullying yang dapat merusak karakter, mental, dan bisa menjadi trauma, pencegahan harus dilakukan sejak dini. Bila tidak maka perilaku perundungan akan menjadi watak hingga dewasa dan merugikan lingkungan sekitar. "Dengan perbaikan akhlak siswa dan kesadaran kolektif, diharapkan kasus bullying dapat diminimalisir dan akhirnya dihapuskan dari lingkungan pendidikan," tutupnya. (Eky/adv/dprdkaltim)

Pewartu : Andi Desky  
Editor : Nicha Ratnasari



Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Ali Hamdi

# Fitri Maisyaroh Sebut Pentingnya Edukasi Pranikah untuk Membangun Ketahanan Keluarga

**SAMARINDA** - Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, edukasi pranikah perlu dilakukan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh menilai, edukasi pranikah merupakan bentuk persiapan yang tak boleh disepelekan. Ada beberapa aspek penting sebutnya, yang acap kali luput disiapkan sebelum menikah. Salah satunya mengenai parenting atau pola asuh anak.

Tak sedikit sebutnya, pasangan yang terjebak dalam memikirkan pernikahan dan pasca nikah saja. Sementara aspek parenting luput untuk dilakukan sebagai persiapan.

"Keinginan untuk menikmati bulan madu, bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan berkunjung ke keluarga besar seringkali mengalahkan keinginan untuk belajar parent-

ing," jelasnya kepada media ini.

Padahal menurutnya, parenting bagaikan investasi. Sangat penting agar dapat membantu pasangan menghadapi berbagai masalah yang mungkin timbul dalam perjalanan menjadi orang tua.

Ilmu pola asuh anak terang Politisi PKS ini bisa membantu pasangan mengerti merawat, mendidik, membimbing anak. Bahkan dapat berguna saat masih dalam masa kehamilan. Parenting juga, membuat pasangan memiliki kesepakatan terkait pola asuh anak.

"Memahami ilmu parenting sebelum menikah adalah langkah bijak untuk memastikan bahwa anak-anak dibesarkan dengan baik. Tidak kalah penting adalah pondasi utama dalam pernikahan adalah agama," pungkasnya. **(eky/adv/dprdkaltim)**

Pewarta : Andi Desky  
Editor : Nicha Ratnasari



Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh

# M. Udin Dorong Alokasi CSR untuk Rumah Layak Huni



Anggota Komisi I DPRD Kaltim Muhammad Udin

**SAMARINDA** - Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Udin mendorong perusahaan tambang yang beroperasi di Kaltim, menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk program Rumah Layak Huni (RLH).

Menurut Politisi Golkar ini, persoalan pemukiman yang tidak layak masih sering ditemui di Bumi Etam. Mengingat banyaknya perusahaan tambang batu bara di Kaltim, ia mendorong para perusahaan tambang tersebut untuk peduli terhadap persoalan permukiman.

"Saya melihat masih banyak masyarakat di pelosok-pelosok Kalimantan Timur yang masih tinggal di pemukiman yang tidak layak," jelasnya kepada awak media, Selasa (24/10/2023).

Udin menilai, semestinya para perusahaan tersebut tak hanya menyalurkan CSR pada area ring 1 mereka saja, namun melihat Kaltim secara utuh. Ia juga mendorong alokasi dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kalau kinerja penyaluran RLH tahun kemarin sudah baik, maka perlu ditingkatkan lagi. Namun perlu dievaluasi bersama agar penyalurannya merata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Legislator yang pernah menjabat Wakil Ketua Pansus Investigasi Pertambangan ini.

Lebih lanjut ia mengatakan, perusahaan tambang semestinya tak hanya menyalurkan CSR untuk hal seremonial saja. Selain untuk RLH, CSR sebutnya juga dapat dialokasikan untuk persoalan infrastruktur dan fasilitas kesehatan di Kaltim. **(eky/adv/dprdkaltim)**

Pewarta : Andi Desky  
Editor : Nicha Ratnasari

# Jahidin Harap Partisipasi Pemilih Disabilitas Meningkatkan di Pemilu 2024

**SAMARINDA** – Anggota Komisi I DPRD Kaltim Jahidin, mendorong agar Pemilu 2024 berjalan kondusif dan tingkat partisipasi meningkat. Ia berharap pelaksanaan pemilihan semua elemen masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya tak terkecuali penyandang disabilitas.

Layaknya sebuah pesta demokrasi, semua orang yang berhak memilih, dapat menggunakan suaranya sebagai bentuk merayakan demokrasi. Ia berharap bahwa setiap pemilih disabilitas dapat merasakan keadilan dan dukungan penuh dari negara dan pihak terkait selama proses pemilihan. Jahidin pun memastikan bahwa pemilih disabilitas sudah dijamin untuk ikut serta pada pemilu 2024.

Ia mengajak penyelenggara pemilu dan masyarakat menyediakan akses khusus untuk para penyandang disabilitas. Agar tidak ada kendala bagi mereka yang ingin memberikan suaranya. "Maka dari itu, aksesnya harus dipermudah. Hal ini mencakup pelayanan kepada orang yang sakit atau memiliki keterbatasan fisik, termasuk orang dengan disabilitas," jelasnya.

Jahidin menerangkan, bagi pemilih yang tidak bisa mengunjungi Tempat Pemilihan Suara (TPS), petugas KPPS akan mengunjungi mereka di rumah untuk memastikan hak pilihnya tetap terjamin. Untuk pemilih yang memang tidak mampu berjalan atau dalam kondisi sakit yang berat, petugas TPS akan datang ke rumah mereka dengan membawa surat suara dan perlengkapan memilih lainnya.

Dan semua itu, terangnya, sudah ada dalam pedoman yang mengatur tentang teknis pendampingan bagi pemilih disabilitas, dan pelaksanaannya juga telah dijalankan di lapangan. "Dengan bantuan petugas, pemilih ini tetap dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri," bebernya.

Politisi PKB ini berkomitmen, terus mendorong upaya-upaya untuk memastikan bahwa semua warga, tanpa pandang keadaan fisik atau keterbatasan, dapat ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi secara merata dan adil.

Komisi I sebut Jahidin, juga terus berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan bagi pemilih disabilitas. "Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan terus berkoordinasi dengan lembaga terkait, diharapkan partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan berikutnya akan semakin meningkat, dan hak-hak mereka tetap terjaga dengan baik," pungkasnya. **(Eky/Adv/DPRDKaltim)**

Pewarta : Andi Desky  
Editor : Nicha Ratnasari



Anggota DPRD Kaltim, Jahidin

# Jahidin Harap Masyarakat Kaltim Terus Jaga Kondusivitas Pemilu 2024

**SAMARINDA** – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Jahidin, berharap seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi dalam menjaga kondusivitas Pemilu 2024.

Menurutnya, jelang pesta demokrasi lima tahunan tersebut, akan banyak narasi yang menyudutkan salah satu pihak. Ia berharap masyarakat menyaring sumber informasi dan tidak mudah terhasut.

"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama men-

jaga kondusivitas daerah menjelang pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 mendatang," ujar Pria dengan latar belakang advokat ini.

Suksesnya Pemilu mendatang, ujar Ketua PKB Samarinda ini, tidak hanya bergantung kepada penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu saja.

Jahidin menilai, bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki peran untuk menyukseskan Pemilu 2024 nanti, mulai dari menjaga kondusivitas sebelum pemilu, menaikkan partisipasi pemilih, dan keamanan pasca

pemilu serta beberapa hal penting lainnya.

Yang jelas menurutnya, Kaltim adalah daerah yang aman dan tentram, dan harus terus terjaga kondusivitasnya meskipun dihuni oleh masyarakat yang majemuk. "Saat ini kita masih kondusif, hal ini yang harus kita pertahankan bersama," pungkasnya. **(Eky/Adv/DPRD Kaltim)**

Pewarta : Andi Desky  
Editor : Nicha Ratnasari

# Puji Setyowati Ingatkan Bahaya Judi Online

**SAMARINDA** - Menjamurnya praktek judi online membuat Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati prihatin. Ia pun mengingatkan kepada masyarakat Kaltim untuk menghindari judi online. Puji menerangkan, masyarakat yang terhimpit persoalan ekonomi, akan mencari cara cepat untuk melipatgandakan uangnya melalui judi. Dengan perkembangan teknologi, situs judi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan, sebanyak 2,76 juta masyarakat Indonesia menjadi partisipan dalam permainan judi online. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,19 juta masyarakat merupakan golongan warga berpenghasilan rendah.

Melihat hal ini, menurut Puji sangat sulit untuk memberantas perkembangan judi yang sudah via online tersebut. Meskipun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir atau menghapus 425.506 konten terkait judi online selama tiga bulan terakhir tepatnya sejak 18 Juli 2023.

Menurut Puji salah satu upaya yang harus dilakukan adalah memberikan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya judi online. Musabab, dampak dari candu judi online dapat merusak kejiwaan seseorang.

"Banyak kasus akibat kecanduan judi online sangat mempengaruhi mental dan psikis seseorang. Dampak depresi dan stres kalau sering kalah main sudah pasti, belum kalau modal habis harus cari banyak cara agar dapat modal," jelasnya.

Politisi Demokrat ini lebih lanjut menerangkan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online, butuh sinergitas dari semua pihak untuk memberikan edukasi. "Kami meminta tenaga pendidikan dan tokoh agama beserta orangtua saling bersinergi dalam memberikan pemahaman dan pengawasan secara terus menerus agar tidak menjadi korban judi online," tegasnya. **(Eky/adv/DPRD Kaltim)**

Pewarta : Andi Desky  
Editor : Nicha Ratnasari



Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati

# Romadhony Beri Apresiasi Pemprov Kaltim Terkait Realisasi Program RLH



Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Romadhony Putra Pratama

**SAMARINDA** - Anggota Komisi III DPRD Kaltim Romadhony Putra Pratama mengapresiasi Pemprov Kaltim, terkait realisasi program Rumah Layak Huni (RLH). Menurut legislator termuda DPRD Kaltim ini, program tersebut sedikit banyak membantu masyarakat prasejahtera. "Saya mengapresiasi itu, sangat membantu warga prasejahtera Kaltim, khususnya warga Samarinda mendapatkan manfaatnya," jelasnya belum lama ini.

Apalagi sebutnya, program tersebut menggandeng perusahaan swasta yang ada di Kaltim. Melibatkan perusahaan dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR), sebut Dhony patut diacungi jempol.

Ia meminta agar CSR dapat menasar hal lain yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kaltim. "Kami selalu suarakan, jangan sampai perusahaan tidak membangun daerahnya," tegasnya.

Sebagai informasi hingga akhir 2022, realisasi pembangunan RLH ini telah mencapai 77,82 persen, dengan rincian akumulatif sejak 2019 hingga 2022 telah dilakukan rehabilitasi sebanyak 19.151 unit rumah, 172 rumah susun (rusun) dan pembangunan 131 RLH. Pemprov Kaltim sendiri, menargetkan 25 ribu RLH untuk keluarga pra sejahtera di Kaltim hingga tahun 2023. **(eky/adv/dprdkaltim)**

Pewarta : Andi Desky  
Editor : Nicha Ratnasari



Kunjungan Pansus DPRD Kutai Kartanegara ke DPRD Provinsi Kaltim

## DPRD Kaltim Terima Kunjungan Raker Pansus DPRD Kukar

**SAMARINDA** – Mewakili pimpinan, S. Roy Hendrayato selaku Tenaga Ahli Pansus Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan DPRD Provinsi Kalimantan Timur menerima kunjungan kerja Pansus Raperda DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Senin (23/23).

Bertempat di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, kunjungan tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk itu Pansus Raperda DPRD Kukar menyambangi DPRD Kaltim agar mendapatkan masukan dalam perancangan Raperda yang dimaksud.

“Pada prinsipnya, kami tenaga ahli dari Pansus Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mewakili Ketua Pansus dan anggota yang mana dalam hal ini

keadaan Reses. Kami menerima baik pertanyaan apapun yang dapat kami jawab terutama dalam proses pembuatan Perda tersebut mulai dari nol sampai akhir mendapatkan nomer daerah,” ucap Roy sapaan akrabnya.

Selanjutnya ia mengharapkan terkait apa yang sudah dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dalam membuat inisiatif Perda Pendidikan Penyelenggara Pancasila juga dapat diikuti oleh DPRD Kabupaten/Kota di Kaltim. Terlebih melihat kondisi saat ini, pemahaman mengenai Pancasila mulai mengendor di kalangan generasi muda.

“Kami monitoring, mudah-mudahan seluruh daerah kabupaten/kota dapat melaksanakan Perda ini sedemikian rupa, untuk kepentingan menumbuh kembangkan kembali Pancasila”, tutupnya berpesan.

Selaras dengan itu, Ketua Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Betaria Magdalena pun mengakui seandainya perancangan Perda

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh DPRD Kukar, pihaknya siap melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.

“Kami ingin lebih cepat untuk menjadikan ini sebuah Peraturan Daerah. Jika redaksi dan muatannya sudah sesuai, kami ingin segera disahkan dan setelah itu akan segera kami sosialisasikan supaya masyarakat paham dan tau pentingnya Pancasila,” ujar Betaria menjelaskan.

Semangat tersebut bukan tanpa alasan, hal itu lantaran Betaria dan anggota DPRD Kukar lainnya menginginkan generasi muda penerus bangsa memiliki moral dan etika sesuai nilai-nilai Pancasila. Meski di tengah maju dan lajunya perkembangan teknologi saat ini. **(Adv/dprdkaltim)**

Pewartu : Andi Desky  
Editor : Nicha Ratnasari



RDP Komisi IV DPRD Kaltim.

## Keluhkan Soal Pembayaran Upah Lembur, Serikat Pekerja “Ngadu” ke Komisi IV

**SAMARINDA** - Komisi IV DPRD Kaltim yang dipimpin oleh Akhmed Reza Fachlevi menerima sejumlah pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kebangsaan Kaltim di ruang rapat Gedung Elantai 1 Kantor DPRD Kaltim.

Serikat pekerja yang bekerja pada salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran tersebut mengeluhkan persoalan hak berupa uang lembur yang belum dibayarkan sejak tahun 2013 sampai 2018.

Tampak hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Rozani Erawadi, BPJS Samarinda dan Pengawas Tenaga Kerja.

Akhmed Reza Fachlevi menjelaskan, tunggakan yang belum terbayarkan oleh pihak perusahaan dari tahun 2013 sampai 2018 totalnya sebesar Rp 7,4 miliar. Namun sebagian dari nilai tersebut telah ada itikad baik dari pihak perusahaan dengan melakukan pembayaran sebagian sehingga kekurangannya tersisa Rp

5,2 miliar.

“Kita berharap permasalahan yang ada dapat diselesaikan oleh perusahaan karena mengingat hal itu merupakan bagian dari hak para pekerja,” ujar politisi partai Gerindra ini belum lama ini.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa pihaknya berkomitmen untuk melakukan pengawalan terhadap persoalan yang dikeluhkan oleh para tenaga kerja dengan meminta Disnakertrans Kaltim dapat membantu mengkomodir masalah tersebut sampai tunggakan oleh perusahaan dapat dibayarkan.

“Kita sudah meminta kepada Disnakertrans Kaltim untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas,” ujarnya.

Dari persoalan terkait tunggakan tersebut, pihak perusahaan mengakui bahwa para tenaga kerja yang belum dibayar upah lemburnya, lantaran berada di serikat pekerja yang berbeda. Walau demikian, bagi Reza, itu bukan sebagai alasan yang bisa diterima untuk tidak menjalankan

kewajiban terkait pembayaran upah lembur.

“Dari persoalan yang ada, kami juga meminta kepada Disnakertrans Kaltim untuk melakukan pendataan serikat pekerja di Kaltim supaya menghindari kejadian serupa terulang kembali,” tandasnya.

Reza mengatakan, dari informasi yang diterimanya, beberapa pekerja atau buruh sudah terbayarkan, namun ada beberapa kendala karena pada saat masuk melamar kerja ada yang menggunakan organisasi serikat pekerja yang lain.

“Sebanyak tiga organisasi serikat pekerja yang mereka pakai untuk masuk kerja, namun ini susah juga. Walaupun tidak ada larangan untuk mengikuti serikat kerja manapun. Kami tetap mengimbuu agar ikut serikat kerja sesuai dengan ketentuan pemerintah,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky  
Editor : Nicha Ratnasari

# Pemanfaatan Hotel Atlet, Salehuddin: Wacana sejak 2016, Tak Ada Tindak Lanjut

**SAMARINDA** - Satu dari sekian banyak aset “tidur” milik Provinsi Kaltim yakni Hotel Atlet, terus didesak oleh DPRD Kaltim pemanfaatannya. Bukan tanpa sebab, Hotel yang dibangun untuk penyelenggaraan PON 2008, tak terawat dibiarkan terbengkalai. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Salehuddin, mempertanyakan alasan Pemprov tak memanfaatkan gedung tersebut untuk fungsi yang lain.

Dugaannya, ada ketidakseriusan dan tidak konsisten pemerintah provinsi, terutama dalam hal pemanfaatan Hotel Atlet. Sebab, semenjak PON 2008 berakhir, gedung tersebut tak dialihkan fungsinya untuk kegunaan lain. “Pemanfaatan Hotel Atlet sudah lama menjadi wacana, sejak 2016. Tapi sampai sekarang, belum ada tindak lanjut yang konkret,” tegas Salehuddin.

“Jangan sampai kita pandai membangun tapi tidak pandai merawat atau memberikan manfaat dari bangunan yang kita bangun,” sambungnya.

Padaahal, menurut Politisi Golkar ini, Hotel Atlet dapat dimanfaatkan untuk hal lain, mulai dari perkantoran, pusat pelayanan publik hingga jadi wadah usaha para pelaku UMKM. “Sayang kalau dibiarkan saja. Sekarang kondisinya sudah miris, banyak peralatan yang tidak berfungsi atau hilang,” ungkapnya.

Salehuddin menganggap, memanfaatkan aset daerah yang terbengkalai, berpotensi untuk menambah pundi-pundi PAD. Tak hanya itu, masyarakat juga akan merasakan dampaknya karena memiliki fasilitas yang memiliki kegunaan. “Kalau Hotel Atlet itu harus punya nilai ekonomi dan sosial dengan dimanfaatkan lagi. Banyak aktivitas pemuda dan olahraga di sana,” tandasnya. (eky/adv/dprdkaltim)



Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin

Pewarta : Andi Desky  
Editor : Nicha Ratnasari

# Yusuf Mustafa Apresiasi Kesiapsiagaan Polda Kaltim Jelang Pengamanan Pemilu 2024



Ketua Komisi I DPRD Kaltim Yusuf Mustafa

**BALIKPAPAN** - Pekan lalu Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Yusuf Mustafa, hadir dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata Mahakam 2023-2024, di Balikpapan.

Yusuf yang mewakili pimpinan DPRD Kaltim, mengatakan bahwa DPRD Kalimantan Timur mendukung penuh, pelaksanaan Pemilu 2024 di Benua Etam berjalan khidmat dengan menjaga persatuan dan kekompakan.

Ia pun memberikan apresiasi melihat kesiapsiagaan personel yang dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Imam Sugianto jelang pengamanan Pemilu 2024. “Sebagai anggota legislatif hanya memonitor, yang jelas kami memberikan dukungan dalam rangka menjelang pemilu. Harus kompak dan bersatu”, ucapnya.

Politisi Golkar ini berharap, Pemilu 2024 dapat berlangsung kondusif. Dengan saling bahu-membahu, saling kompak dalam mendukung serta mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan damai.

Turut hadir peserta apel meliputi FKPD TK I, Pejabat Polda serta stake holder lainnya. Kemudian, Apel ditutup dengan penyematan pita oleh Kapolda Kaltim kepada tiga perwakilan personil. (Eky/Adv/dprdkaltim)

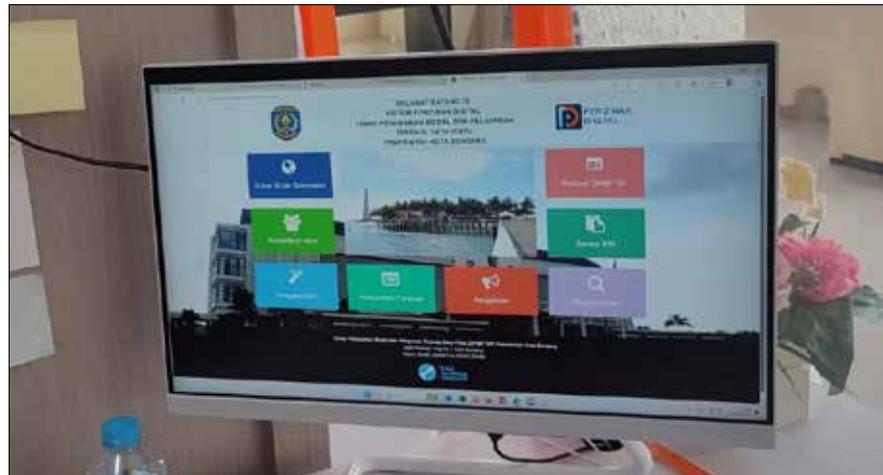
Pewarta : Andi Desky  
Editor : Nicha Ratnasari

# DPMPTSP Buka Pelayanan Online Sejak 2018

**BONTANG** - Salah satu langkah memaksimalkan pelayanan untuk masyarakat yang semakin modern ini, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah membuka perizinan online sejak 2018 lalu.

Pelayanan ini milik pemerintah daerah namun dikelola oleh DPMPTSP. Beberapa perizinan sebenarnya telah dialihkan ke Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) mulai 2019, sehingga dalam perizinan digital terdapat 46 jenis kepengurusan sisanya.

Beberapa jenis yang dapat diurus di perizinan digital yakni izin bongkar trotoar, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin mendirikan rumah sakit pemerintah, izin operasional klinik pemerintah, izin operasional laboratorium kesehatan, izin operasional puskesmas, izin operasional rumah sakit pemerintah dan masih



SYAKURAH/RADARBONTANG

## Website perizinan digital DPMPTSP.

banyak lagi.

Kepengurusan ini dapat dilakukan di rumah dengan membuka website <https://pd.bontangkota.go.id> atau datang langsung ke DPMPTSP, nantinya jika datang ke PTSP akan diberikan arahan terkait berkas-ber-

kas yang harus diupload.

"Kalau berkas yang diurus melalui perizinan digital itu biasanya ada jangka waktunya sekitar 6 bulan, kalau izin di OSS-RBA bisa berlaku selamanya," jelas Fidia, Customer Service DPMPTSP. (sya/adv)

# Anak Takut ke Dokter? Ada Beberapa Tips Jitu untuk Mengatasinya

**BONTANG** - Mengajak anak ke dokter sering kali menjadi tantangan bagi para orang tua. Sebagian besar anak menolak dan sangat rewel ketika akan diperiksa oleh dokter. Anak menjadi takut saat diperiksa oleh dokter, membuat sebagian orang tua cemas dan khawatir.

Dokter Spesialis Anak, Dr. Arlita Eka Putri Vivin Puspitasari, Sp.A di RSUD Taman Husada Bontang memberikan beberapa tips dan cara mudah untuk mengatasi anak yang takut jika ingin diperiksa oleh dokter.

"Dalam artian, ada beberapa hal kepentingan saat bertemu dengan dokter. Bisa jadi datang menemui dokter saat lagi kontrol, periksa karena sedang dalam keadaan batuk pilek, bahkan saat anak disuntik untuk mendapatkan vaksinasi," ucapnya, Selasa (24/10/2023).

Diusahakan untuk tetap menyam-paikan ke anak-anak jika nantinya akan pergi ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit (RS), bahkan ke Klinik. Dan disarankan agar anak bisa membawa mainan, atau cemilan kesukaannya.

"Nantinya saat pergi menemui dok-

ter anak-anak bisa membawa mainan favoritnya, biar mereka merasa nyaman. Bahkan bisa juga membawa cemilan atau snack kesukaan mereka," paparnya.

Selain membawa mainan atau cemilan kesukaan anak, kita sebagai orang tua tidak boleh berbohong kepada anak, atau memberikan harapan palsu. "Jangan juga berbohong, misalkan mengatakan jika nantinya di rumah sakit sangat banyak mainan, atau segala macam. Intinya jangan memberikan harapan yang tidak pasti kepada anak-anak," ungkapnya.

Selain itu juga, dr Putri juga menambahkan beberapa hari sebelum pergi ke Puskesmas, rumah sakit, atau klinik, sebaiknya anak tersebut diberi arahan terlebih dahulu untuk pemeriksaan. Bahkan dipraktikkan di rumah, seperti apa dokter melakukan pemeriksaan. Mulai dari membuka mulut, mengecek suhu badan menggunakan Termometer, bahkan memeriksa bagian dada menggunakan Stetoskop. (adv)

Pewarta : Dwi

Editor : Nicha Ratnasari



**Dr Arlita Eka Putri Vivin Puspitasari, dokter spesialis anak RSUD Taman Husada Bontang.**

TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000\_bontang —

**LET'S TEST DRIVE!**

**EZ Deal**  
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

**DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE**

**AUTO2000 BONTANG**  
Jl. Wigen Amas No. 2266, Sebeling Bar. Bontang Barat  
Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive  
Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD  
APLIKASI M-TOYOTA

**AUTO 2000**  
member of ASTRA

Urusan Toyota lebih mudah!



SAMARINDA

# GASTRONOMY PACKAGE



Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 18 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 75 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

**Berlaku hingga 30 Desember 2023**

SCAN BARCODE  
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:

@ibishotelsamarinda 0811 - 551 - 6000

[all.accor.com](https://all.accor.com)



# PROMO TRAKTIR TEMAN BUY 4 GET 1 FREE

Start From <sup>Rp</sup>15.000 nett/person



Nasi Goreng Kampung



Mie Goreng Kampung



Tempe Goreng Tepung



Pisang Goreng Kaya



Teh Tarik Spirit

## BEBAS PILIH MENU !

\*syarat dan ketentuan berlaku

[www.hotelgrandkartika.com/inspirasi](http://www.hotelgrandkartika.com/inspirasi)



Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin saat membuka Silaturahmi Nasional (Silatnas) ke-VII Kontak Santri Agribisnis Indonesia (Konsain) di Pondok Pesantren Syaichona Cholil, Selasa (24/10).

## Wapres RI Buka Silatnas ke-VII Konsain di Balikpapan

**BALIKPAPAN** - Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin membuka secara langsung Silaturahmi Nasional (Silatnas) ke-VII Kontak Santri Agribisnis Indonesia (Konsain) di Pondok Pesantren Syaichona Cholil, Selasa (24/10/2023).

Sebelum membuka secara resmi, Wapres sempat memberi arahan kepada kiai, bu nyai dan para santri terkait peran santri di Indonesia. Hal ini tak lepas dari Hari Santri Nasional yang baru saja diperingati pada 22 Oktober kemarin.

Wapres mengatakan, peran santri dalam bidang pembangunan di Indonesia sangat penting. Bahkan melalui bidang perekonomian, peran santri harus bisa sangat unggul. Hal

ini berkaca pada pengalaman santri di masa lampau, di mana santri memiliki andil dalam kemakmuran negeri ini.

"Santri itu harus membawa perbaikan sebagai penjaga tanah air, negara dan bangsa," ujarnya.

Lebih lanjut Wapres menjelaskan, para santri juga diharapkan mampu memakmurkan perekonomian bangsa dalam berbagai bidang. Dan salah satunya seperti agribisnis ini.

"Saat ini peran santri mulai berkrang dalam pembangunan. Untuk itu ayo para santri bangkit, momentum Hari Santri Nasional kemarin adalah kebangkitan bagi para santri," jelasnya.

Adapun sektor agribisnis yang

diharapkan mampu menopang perekonomian bangsa, adalah santri dapat memanfaatkan pertanian, peternakan, pertanian bahkan jika perlu melalui perdagangan.

"Kan bisa santri membuka usaha pertanian, peternakan kalau perlu ada perdagangan. Sehingga perekonomian bangsa ini semakin maju," tambah Wapres.

Usai memberi arahan, Wapres pun langsung membuka Silaturahmi Nasional (Silatnas) ke-VII Kontak Santri Agribisnis Indonesia (Konsain) dengan memukul beduk.

*Penulis: Aprianto  
Editor: Nicha Ratnasari*



## Rurant Adat Sempekat, Bupati Yapan Sampaikan Terima Kasih untuk Warga Kubar

**KUTAI BARAT** - Dalam rangka pelaksanaan acara Dahau Hari Ulang Tahun (HUT) Kutai Barat (Kubar) ke-24, Pemerintah Kabupaten Kubar melaksanakan Rurant Adat Sempekat, yakni Pertemuan Makan Bersama tokoh, pejabat, dan lapisan masyarakat.

Acara yang dimulai pukul 12.00 Wita pada Senin (23/10/2023) di Lamin Oheng Barong Tongkok, diikuti oleh 150 undangan yang turut dihadiri Bupati Kutai Barat, FX Yapan bersama Wakil Bupati Kubar Edyanto Arkan, Asisten, Staf Ahli, Ketua DPRD, Dandim, Kaporles, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Anggota DPRD, Para Pejabat Aselon, Camat, dan jajaran masyarakat yang hadir untuk meriahkan acara tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati FX Yapan mengungkapkan bahwa acara ini sebagai pembuka acara Dahau yang ke-24 yang dimulai pada 23 Oktober - 5 November 2023.

"Selain agenda kegiatan Dahau, juga akan ada rencana penyambutan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang mudah-mudahan dapat hadir di Kabupaten Kutai Barat," terang Bupati Kubar.

Menurutnya, warga Kubar patut bersyukur IKN dan Kutai Barat adalah sebagai kota penyangga. Tentunya hal ini akan berdampak kepada masyarakat di Kutai Barat.

"Melalui kerjasama dengan Kepala Adat Besar Kabupaten termasuk juga salah satu panitia seksi adat, juga ada rencana pelantikan pengurus adat Kabupaten," lanjut Yapan.

Tak lupa pihaknya turut berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Barat yang telah membantu selama kepemimpinannya. "Saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah selama kepemimpinan yang saya jalankan," tutur Yapan.

Sementara itu Kapolres Kutai Barat AKBP Heri Rusyaman yang berhalangan hadir dan diwakili oleh Kabag

Ops AKP Emanuel Teguh Budi Santoso menyampaikan Polres Kutai Barat siap menerima dan juga mendukung kegiatan acara Dahau.

"Kami juga akan menempatkan anggota untuk mengamankan secara terbuka maupun tertutup kegiatan baik itu pelaksanaannya maupun juga warga masyarakat Kabupaten Kutai Barat," imbuhnya.

Selain itu, kegiatan Dahau dipastikan aman dan kondusif karena kerjasama dan hasil dukungan semua pihak. "Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan maupun juga dalam penyampaian karena dalam hal ini kami hanya mewakili dari pada bapak Kapolres yang tidak bisa hadir," pungkasnya.

Penulis : Ichal

Editor : Nicha Ratnasari





RDP dengan pedagang serta OPD terkait

## Pedagang Pasar Senaken Datangi DPRD, Tanyakan Penggunaan Kios Baru

**PASER** - Sekelompok pedagang di Pasar Induk Penyembolum Senaken mendatangi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser dalam meminta kepastian penggunaan kios baru yang tak kunjung dihuni.

Kedatangan para pedagang itu diterima Komisi III DPRD Kabupaten Paser dan melangsungkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Paser, Basri Mansur menyatakan, pedagang yang berhak menempati kios baru harus memenuhi empat kriteria. Yakni sudah didata, aktif membayar retribusi, punya Hak Guna Pakai (HGP) dan tidak punya tunggakan retribusi.

"Kami sudah minta Pemkab Paser untuk bisa memverifikasi semua pedagang dan harus sesuai perda dan aturan yang ada. Artinya satu

pedagang hanya boleh satu lapak dan tidak boleh lebih," tegasnya.

Basri menegaskan, jika permasalahan ini masih berlarut, ia memastikan DPRD Kabupaten Paser akan membentuk Panitia Khusus (Pansus). Sehingga ia meminta keseriusan Pemkab Paser untuk segera menindaklanjuti hal tersebut.

"Jangan ada permainan satu pedagang satu, tidak boleh lebih lagi. Sebelumnya ada juga kebijakan bahwa yang memiliki lima lapak, bisa dapat dua lapak, tapi saya tegaskan tidak boleh lebih dari satu," katanya.

Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Paser, Adi Maulana memastikan bahwa Pemkab Paser pada intinya ingin menata, supaya Pasar Induk Penyembolum Senaken lebih menarik.

"Jika rapi, tertib, tentu banyak orang yang datang, dan yang untung pun juga pedagang," katanya.

Dalam penataan pedagang, Pem-

kab Paser memiliki berbagai regulasi. Namun ia menyadari adanya peraturan ini pasti berdampak pada ragam tanggapan pedagang. Sehingga ia akan mencoba menyesuaikan aturan dengan usulan para pedagang.

"Semisal ada pedagang hanya memenuhi satu, dua atau tiga kriteria, hal demikian lah yang masih dirapatkan oleh tim. Apakah ada pedagang yang tidak memenuhi empat syarat itu, apabila pedagang hanya memenuhi dua syarat bagaimana ini masih kita rapatkan lagi," katanya.

Dalam RDP tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Paser yang hadir, yakni Budi Santo dan Lamaludin. Sementara dari OPD yakni Kasatpol PP Kabupaten Paser, M Guntur, Kepala Disperindagkop UKM Kabupaten Paser, M. Yusuf.

Pewarta : Bhakti Sihombing  
Editor : Nicha Ratnasari



# MERCURE

HOTELS

SAMARINDA



## KARNAVALL Batik Nusantara

Rayakan warisan budaya Batik bersama  
ALL - Accor Live Limitless di Indonesia.

Nikmati sarapan gratis dan dapatkan  
harga khusus serta pengalaman berbeda

Pesan & menginap hingga 31 Desember 2023.

Book, stay, enjoy  
**THAT'S ALL**.COM